

**ANALISIS PENERAPAN GREEN ACCOUNTING DI PTPN III
KEBUN RAMBUTAN DAN KEBUN GUNUNG PARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Nama : Pipin Nurafika
N P M : 1405170340
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : PIPIN NURAFIKA
N P M : 1405170340
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN *GREEN ACCOUNTING* DI PTPN III
KEBUN RAMBUTAN DAN KEBUN GUNUNG PARA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

Penguji II

NOVIEN RIALDY, S.E., M.M

Pembimbing

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., CA

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris



ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : PIPIN NURAFIKA

NPM : 1405170340

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN GREEN ACCOUNTING DI
PTPN III KEBUN RAMBUTAN DAN KEBUN GUNUNG
PARA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2018

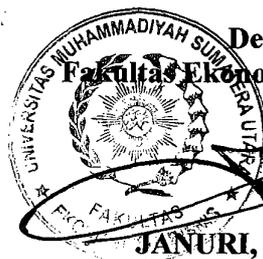
Pembimbing Skripsi

DR. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si

Diketahui /Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

JANURI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : PIPIN NURAFIKA
NPM : 1405170340
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN
JUDUL PROPOSAL : ANALISIS PENERAPAN GREEN ACCOUNTING DI
PTPN III KEBUN RAMBUTAN DAN KEBUN
GUNUNG PARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
1/3 18	- pembabasan luas konsep daya tem? yg digunakan gubahan Tem? yg luas terkait		
1/3 18	- perbaikan cara penomoran tabel - pembabasan lebih di perjelas, dukungan data luas ada - cek lagi daftar pustaka		
1/3 18	- स्पष्ट perbaiki lihat pedoman - lihat cara pengutipan lihat pedoman - perbaiki sman		

Medan, Februari 2018

Dosen Pembimbing

DR. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si

Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pipin Nurafika

NPM : 1405170340

Program Studi : Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Analisis Penerapan *Green Accounting* di PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya yang memperoleh data penelitian dari kantor dimana saya melakukan riset yaitu pada PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan inni saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat Pernyataan



PIPIN NURAFIKA

ABSTRAK

Pipin Nurafika. NPM. 1405170340. Analisis Penerapan Green Accounting Di PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para, 2018. Skripsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan *Green Accounting* yang dilakukan perusahaan dalam hal mengidentifikasi, mengakui, mengukur, mencatat, menyajikan dan mengungkapkan biaya pengendalian lingkungan/limbah pada laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para yang memproduksi sawit dan karet serta memiliki limbah.

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mengelompokkan biaya-biaya lingkungan kemudian menganalisis, melakukan wawancara dan menyimpulkan.

Hasil penelitian ini adalah PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para sudah mengeluarkan biaya-biaya lingkungan dalam akuntansi perusahaannya namun tidak secara khusus melakukan identifikasi terhadap biaya-biaya lingkungan tersebut. Pengakuan terhadap biaya-biaya lingkungan diakui sebagai beban diluar beban pokok produksi. Biaya-biaya pengendalian lingkungan/limbah ini diukur dengan menggunakan satuan moneter sebesar kos yang dikeluarkan (*historical cost*) dan dicatat dengan metode *accrual basic*. Penyajian biaya lingkungan disajikan bersama biaya-biaya yang sejenis dalam laporan laba rugi dan perusahaan belum mengungkapkan informasi mengenai biaya lingkungan yang dikeluarkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kata Kunci : Green Accounting, Biaya Lingkungan, Biaya Pengendalian Lingkungan/limbah, Penerapan Green Accounting.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat, Karunia, dan Hidayah-Nya serta kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada Suri Tauladan Nabi Besar Muhammad SAW.

Dasar tujuan dibuatnya skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi. Skripsi disusun berdasarkan pengamatan penulis terhadap penerapan green accounting yang dapat digunakan sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya dan tetap menjaga dan memperhatikan sumber daya alamnya sehingga tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi menjaga kelestarian lingkungan dan masyarakat. Untuk itu penulis menyusun sebuah skridengan judul “**ANALISIS PENERAPAN GREEN ACCOUNTING DI PTPN III KEBUN RAMBUTAN DAN KEBUN GUNUNG PARA**”.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan kedua orang tua yang paling saya sayangi dan cintai, kepada **Ayahanda Sugiman dan Ibunda Nur'ainun** terima kasih atas dukungan, nasihat, perhatian dan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis, serta doa yang tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Terima kasih juga kepada adik-adik saya **Nisa Nabila dan Habib Khalis** yang telah mendukung dan memotivasi penulis.

Skripsi ini juga dapat terselesaikan atas dukungan dari beberapa pihak, terima kasih kepada:

1. Bapak **Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Januri, SE.,M.M.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Bapak **Ade Gunawan, SE.,M.Si** serta Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE.,M.Si** selaku WD I dan WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Fitriani Saragih, SE.,M.Si** selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan dosen pembimbing akademik penulis serta Ibu **Zulia Hanum, SE.,M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Dr. Eka Nurmala Sari, SE.,M.Si.,Ak** selaku Dosen Pembimbing skripsi, terima kasih atas bimbingan ibu selama ini dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Sahabat-sahabat saya semasa SMA (ADIPATWO), Findy Ayudia Lestar, Sri Oktavianti, Maya Mashita, Nurul Ichsani Purba, Meilisa Immazinas, Ilham Fachrezi, Ryan Parlindungan Lubis, Muhammad Farhan, Nurul Hadi nasution serta teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, perhatian, dan semangat yang diberikan selama ini dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat Squad, Meilisa Immazinas, Novita Trismayanti, Elvi Rahmatika, Nuraini Damanik, Iftitah, Firis Adilla Siahaan, Ayudinda Lestari, Habibah Suri Latifah. Terima kasih atas semangat, perhatian, dan kepedulian yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat saya Tifani Amelia, Riska Prameswari Harahap, Vivi Novila Dachi, Nina Sarah. Terima kasih atas perjuangan yang kita lakukan bersama-sama, perhatian, dukungan, dan bantuan yang kalian berikan kepada penulis dalam keseharian dan penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman di kelas E-pagi, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, dan waktu yang kita lewati bersama semasa kuliah.
10. Teman-teman tim olimpiade, partner dalam segala hal, Putri Puspita sari, Zili Saidah, Dolly Billi Junawi. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan bantuan kepada penulis.
11. Teman-teman BIDIKMISI UMSU Angkatan 2014, terima kasih atas dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Akhir kata, penulis mengucapkan sekian dan terima kasih.

Medan, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis.....	14
1. Pengerian Green Accounting.....	14
2. Sejarah dan Perkembangan Green Accounting	16
3. Tujuan Penerapan Akuntansi Lingkungan	18
4. Pentingnya Akuntansi Lingkungan	19
5. Fungsi dan Peran Akuntansi Lingkungan	20
6. Manfaat Akuntansi Lingkungan	22
7. Perbedaan Akuntansi Konvensional Dengan Akuntansi Lingkungan.....	23
8. Sifat Dasar Akuntansi Lingkungan.....	24
9. Biaya Lingkungan.....	26
10. Tahapan Perlakuan Alokasi Biaya Lingkungan	28
a. Identifikasi	29
b. Pengakuan	32
c. Pengukuran	34
d. Pencatatan	35
e. Penyajian	36
f. Pengungkapan.....	40
11. Peraturan Yang Terkait dengan Green Accounting	44
12. Hasil-hasil Penelitian Sebelumnya	46
B. Kerangka Berpikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	50
B. Definisi Operasional Variabel	50

C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	51
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan data	54
F. Teknik Analisis Data.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Perusahaan	56
a. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	56
b. Visi dan Misi Perusahaan	57
c. Struktur organisasi Perusahaan	58
d. Kegiatan Produksi.....	60
1) Jenis Produk	60
2) Bahan yang Digunakan dalam Memproduksi Sawit & Karet.....	60
3) Proses Produksi PKS Rambutan dan PPK Gunung Para.....	61
4) Pengolahan Limbah Produksi PKS Rambutan dan PPK Gunung Para	65
2. Deskripsi Data	68
a. Identifikasi dan Komponen Biaya Lingkungan	68
b. Pengakuan.....	72
c. Pengukuran	73
d. Pencatatan.....	75
e. Penyajian	76
f. Pengungkapan.....	77
B. Pembahasan	
1. Identifikasi Biaya Lingkungan dan Komponen yang Termasuk Didalamnya	77
2. Mengakui Biaya Lingkungan.....	81
3. Mengukur Biaya Lingkungan	82
4. Pencatatan.....	83
5. Menyajikan Biaya Lingkungan.....	84
6. Mengungkapkan Biaya Lingkungan	88

BAB V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Tabel luas lahan dan jenis tanaman	5
Tabel I.2 Tabel Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Pengolahan Karet	5
Tabel I.3 Tabel Laporan Laba Rugi Kebun Gunung Para	6
Tabel I.4 Tabel Laporan Laba Rugi Kebun Rambutan	7
Tabel II.1 Tabel Contoh Pencatatan Biaya Pengelolaan Limbah PG Djatiroto.	36
Tabel II.2 Biaya konservasi Lingkungan	42
Tabel II.3 Laporan Biaya lingkungan Tahun 2012	42
Tabel II.4 Laporan Biaya Lingkungan RSUD Kota Mataram ...	43
Tabel II.5 Tabel Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	46
Tabel III.1 Perincian Waktu Penelitian.....	53
Tabel III.2 Kisi-kisi Wawancara.....	54
Tabel IV.1 Pengakuan Biaya Lingkungan PKS Rambutan dan PPK Gunung Para.....	72
Tabel IV.2 Pengukuran Biaya Lingkungan	74
Tabel IV.3 Contoh Pencatatan Biaya Pengolahan Limbah PKS Rambutan dan PPK Gunung Para	75
Tabel IV.4 Perbandingan Identifikasi Biaya Lingkungan.....	79
Tabel IV.5 Pengukuran Biaya Lingkungan	82
Tabel IV.6 Perbandingan Penyajian Biaya Lingkungan.....	86
Tabel IV.7 Contoh Laporan Biaya Lingkungan PKS Rambutan dan PPK Gunung Para	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Hubungan Fungsi Internal dan Eksternal Akuntansi Lingkungan.....	22
Gambar II.2 Kerangka Berpikir.....	49
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perusahaan saat ini semakin pesat, sejalan dengan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat itu sendiri. Perusahaan merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan sumber daya berupa bahan baku dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat. Perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, akan tetapi sebagian besar perusahaan mempunyai tujuan yang sama yaitu memaksimalkan laba (Nilasari, 2014).

Perusahaan yang ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya harus memperhatikan “*3P (People, Planet, dan Profit)*” atau yang dikenal dengan konsep *Tripple Bottom Line*. Selain berorientasi pada laba (profit), perusahaan juga wajib untuk peduli terhadap kesejahteraan masyarakat (people) dan berperan aktif dalam proses pelestarian lingkungan hidup (planet) (Wibisono, 2007 dalam Fatwadi, 2016). Pada satu sisi, aktivitas perusahaan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mampu menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, akan tetapi di sisi lain aktivitas perusahaan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan karena menghasilkan limbah (Fatwadi, 2016).

Isu kerusakan lingkungan saat ini menjadi perhatian khusus masyarakat. Kerusakan lingkungan ini salah satunya dapat dihasilkan dari limbah produksi perusahaan. Dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, limbah diartikan sebagai sisa suatu usaha atau kegiatan produksi, sedangkan pencemaran diartikan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Limbah yang dihasilkan dari operasional perusahaan memiliki kemungkinan bahwa limbah tersebut berbahaya bagi lingkungan sehingga memerlukan pengelolaan dan penanganan yang khusus oleh perusahaan agar tidak menyebabkan dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan tempat perusahaan beroperasi.

Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat proses produksi yang dilakukan disebabkan oleh perusahaan industri dan pabrik yang tidak memperhatikan pengelolaan dan penanganan limbahnya, biasanya kejadian seperti ini terjadi apabila perusahaan membuang limbahnya langsung ke sungai sehingga dampak yang dihasilkan sangat besar untuk masyarakat, seperti kasus yang dilakukan oleh empat perusahaan di bidang tekstil yang berada di Bandung, PT Gede Indah, PT Sinar Sukses Mandiri, PT Selaras Idola Abadi, PT Surya Tekstil telah mencemari sungai (DAS) Citarum dengan limbah kimia. Kemudian kasus air PDAM yang diduga sudah tercemar limbah pabrik PT Makin yang mengakibatkan ratusan warga Teluk Renda Ilir Kabupaten Tebo terserang penyakit gatal-gatal hingga bernanah (daerah.sindonews.com, Januari 2018), dan masih banyak lagi jenis pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri. Tingkat persentase pencemaran lingkungan dari tahun ke tahun juga semakin meningkat khususnya pencemaran air sungai, seperti yang dikatakan oleh Kasi Pengendalian Pencemaran Air Rumah Tangga Direktorat Jenderal

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan RI, Winoto bahwasanya berdasarkan sampel sungai di Indonesia yang mereka kaji, 75% tercemar berat. Sementara kontribusi limbah domestik di beberapa sungai besar di atas 60% (menlh.go.id, 2017).

Dalam pengelolaan limbah produksi, perusahaan perlu menerapkan *green accounting* atau akuntansi lingkungan untuk mendukung kegiatan operasional terutama dalam pengelolaan limbah produksi. Saat ini di Indonesia pengungkapan mengenai akuntansi lingkungan masih belum diatur secara khusus dalam standar akuntansi, artinya pelaporan informasi lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan masih bersifat sukarela. Akan tetapi IAI secara implicit menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan (Hadi, 2012 dalam Mulyani, 2013). Dijelaskan dalam PSAK No.1 Tahun 2009, paragraf 9 yang menyatakan:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (Value added Statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Konsep green accounting sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa, diikuti mulai berkembangnya penelitian-penelitian yang terkait dengan isu green accounting tersebut di tahun 1980-an. Di negara-negara maju seperti yang ada di Eropa dan Jepang, perhatian akan isu-isu lingkungan ini berkembang pesat baik secara teori maupun praktik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peraturan terkait dengan lingkungan ini (Himawan, 2016). Akuntansi lingkungan adalah suatu istilah yang berupaya untuk mengelompokkan pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konvensi lingkungan ke

dalam pos lingkungan dan praktik bisnis perusahaan (Suartana, 2010 dalam Yuliantini 2017). Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental cost*), dan manfaat atau efek (*economic benefit*), serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan (*environmental protection*) (Ikhsan, 2008).

Pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan. Pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut memerlukan pengukuran, penilaian, pengungkapan dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan. Penerapan green accounting juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar biaya lingkungan yang dikeluarkan dalam mengelola limbah tersebut dengan menggunakan sistem akuntansi sehingga dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan, dapat mengontrol tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitar perusahaan, serta dapat membuat laporan biaya lingkungan untuk dijadikan suatu pedoman manajemen dalam pengambilan keputusan.

PTPN III Persero adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak dengan kegiatan usahanya memanfaatkan sumber daya alam yaitu sawit dan karet yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari proses produksi yang menghasilkan limbah. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah berdasarkan UU No.40 Tahun 2007. Dari hasil kegiatan operasional perusahaan, PTPN III pernah melakukan pencemaran lingkungan salah satunya

terjadi di PKS milik PTPN III Kebun Rambutan sudah melanggar KEPMEN LH No.51/MEN LH/10/1955 dimana limbah cair milik PKS Perkebunan Rambutan selalu masuk ke alahan persawahan warga ketika hujan turun sehingga puluhan hektar sawah masyarakat mengalami gagal panen (Agus Rempala, 7 Agustus 2009). Kemudian di Kebun Gunung berdasarkan hasil observasi, Pada September 2017 di Kebun Gunung Para, terjadi pencemaran lingkungan dengan bocornya kolam penampungan limbah dan mencemari sungai yang berada di sekitar lingkungan pabrik (Yulandi, 21 Desember 2017).

PTPN III memiliki beberapa komoditi kebun yang mengolah karet dan sawit, dua diantaranya yaitu Kebun Rambutan yang mengelolah sawit dan Kebun Gunung Para yang mengelola karet. Berikut ini data luas lahan dan kapasitas pengolahan.

Tabel I.1
Luas Lahan dan Jenis Tanaman

Distrik	Luas Area Tanaman	Jenis Tanaman
Kebun Rambutan	6.372,70 ha	Kelapa Sawit & Karet
Kebun Gunung Para	3.495,27 ha	Kelapa Sawit & Karet

Sumber: Annual Report PTPN III Tahun 2014

Tabel I.2
Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Pengolahan Karet

Nama Pabrik	Kapasitas Pengolahan	Kabupaten
PKS Rambutan	30 Ton/Jam	Serdang Bedagai
PPK Gunung Para	46,8 Ton KK/Hari	Serdang Bedagai

Sumber : Annual Report PTPN III Tahun 2014

Dari semua aktifitas lingkungan yang dilakukan PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para maka akan menimbulkan biaya lingkungan. Salah satunya dalam proses operasi, masing-masing kebun memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL ini dioperasikan untuk mengelola limbah

yang berasal dari kegiatan produksi. Selama proses pengelolaan limbah terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para untuk membiayai aktivitas pengelolaan limbah yang merupakan biaya pencegahan pencemaran. Berikut ini laporan laba rugi masing-masing kebun yang memuat biaya-biaya pengendalian lingkungan/limbah:

Tabel I.3
Laporan Laba Rugi Kebun Gunung Para

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) LAPORAN LABA RUGI BUDIDAYA KARET DAN KELAPA SAWIT PERIODE DESEMBER 2016 KEBUN: GUNUNG PARA			
NO. REK.	URAIAN	RUPIAH	
		KARET	KELAPA SAWIT
	Pendapatan Penjualan	52.263.987.116	21.203.981.923
	Beban Pokok Penjualan		
	• Persediaan Awal		
	• Beban Pokok Produksi		
600.00	Gaji, Tunj. dan B.Sosial	1.251.722.435	247.856.178
601.20-601.99	Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan	535.407.473	677.684.704
601.60-600.69	Pemupukan	788.282.495	3.563.920.101
602.00-602.09	Panen	23.355.653.767	1.706.283.152
602.10-602.23	Pengangkutan ke Pabrik	679.293.163	1.550.859.576
400.00-413.00 dan 490.11	Beban Overhead	5.806.093.208	1.877.725.121
	Jumlah Beban Tanaman	32.416.452.542	9.624.328.831
	Laba/Rugi Sebelum Beban diluar Beban Pokok Produksi	19.847.534.574	19.000.841.484
	Beban diluar Beban Pokok Produksi		
420.00-431.00 dan 492.00	• Beban Umum Kebun	1.642.638.844	545.267.642
497.00	• Beban Penyusutan Overhead dan Umum	6.258.607.945	1.850.961.412
	Jumlah Beban Kebun diluar Beban Produksi	7.883.246.789	2.396.229.054

Lanjutan Tabel I.3

	• Persediaan Akhir		
	Total Harga Pokok kebun	40.299.699.330	12.020.557.884
	Laba/Rugi Usaha	11.964.287.785	9.183.424.039

Sumber. Laporan Laba Rugi kebun Gunung Para Tahun 2016

Tabel I.4

Laporan Laba Rugi Kebun Rambutan

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)			
LAPORAN LABA RUGI BUDIDAYA KARET DAN KELAPA SAWIT			
PERIODE DESEMBER 2016			
KEBUN: RAMBUTAN			
NO. REK.	URAIAN	RUPIAH	
		KARET	KELAPA SAWIT
	Pendapatan Penjualan	15.834.209.357	79.765.493.870
	Beban Pokok Penjualan		
	• Persediaan Awal		
	• Beban Pokok Produksi		
600.00	Gaji, Tunj. dan B.Sosial	255.176.025	1.719.062.020
601.20-601.99	Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan	11.865.635	7.856.439.285
601.60-600.69	Pemupukan	274.459.238	7.918.628.756
602.00-602.09	Panen	8.813.204.179	11.863.053.803
602.10-602.23	Pengangkutan ke Pabrik	1.058.339.364	5.276.015.467
400.00-413.00 dan 490.11	Beban Overhead	1.306.001.936	10.161.669.314
	Jumlah Beban Tanaman	11.719.046.377	44.794.868.645
	Laba/Rugi Sebelum Beban diluar Beban Pokok Produksi	4.115.162.980	34.970.595.225
	Beban diluar Beban Pokok Produksi		
420.00-431.00 dan 492.00	• Beban Umum Kebun	307.472.911	2.994.858.038
497.00	• Beban Penyusutan Overhead dan Umum	3.121.894.814	6.044.266.284
	Jumlah Beban Kebun diluar Beban Produksi	3.429.367.725	9.039.124.322
	• Persediaan Akhir		
	Total Harga Pokok kebun	15.148.414.102	53.833.922.967
	Laba/Rugi Usaha	685.795.255	25.931.471.903

Sumber. Laporan Laba Rugi kebun Rambutan Tahun 2016

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa biaya lingkungan/limbah belum dirincikan atau diidentifikasi dan dikelompokkan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil observasi langsung ke unit kebun, PTPN III Kebun rambutan dan kebun Gunung Para sudah melakukan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengeluarkan biaya-biaya pengendalian lingkungan/limbah. Biaya lingkungan di PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para dikategorikan ke dalam rekening 422.00. Dari data di atas rekening tersebut masuk dalam kelompok biaya umum kebun. Hal ini menjadi perhatian dikarenakan perusahaan masih menggabungkan atau menyajikan biaya-biaya pengendalian lingkungan ini bersama dengan akun lain. Sementara itu, teori mengungkapkan bahwa penyusunan laporan biaya lingkungan akan membantu manajemen dalam menghadapi para *stakeholder* yang peduli terhadap lingkungan dan tidak semua para *stakeholder* memahami isi dari laporan keuangan tersebut sehingga berdampak pada rasa ketidakpuasan. Dengan menyusun laporan biaya lingkungan perusahaan dapat melakukan evaluasi atas aktifitas lingkungan perusahaan, serta dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan komprehensif sehingga informasi tersebut dapat membantu manajemen dalam memperbaiki kinerja lingkungannya (Bangun, 2013). Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh De Beer dan Friend (2005) membuktikan bahwa pengungkapan semua biaya lingkungan, baik internal maupun eksternal, dan mengalokasikan biaya-biaya ini berdasarkan tipe biaya dan pemicu biaya dalam sebuah akuntansi lingkungan yang terstruktur akan memberikan kontribusi baik pada kinerja lingkungan dan keberhasilan perusahaan (Aniela, 2012). Pengungkapan biaya lingkungan juga akan meningkatkan nilai dari perusahaan karena kepedulian

perusahaan terhadap pelestarian lingkungan. Manajemen perusahaan dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi dari pengungkapan tersebut sehingga dapat mempermudah pengambilan keputusan (Arisandi dan Frisko, 2011 dalam Kusumaningtias, 2013).

Masalah pencemaran lingkungan ini menjadi masalah yang sangat meresahkan masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini akan terjadi penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat dari kegiatan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian terkait penerapan green accounting ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya Fitri Nilasari (2014) terhadap pengelolaan limbah di PG Djatiroto, hasilnya dapat diketahui bahwa perusahaan menyadari kerugian yang akan dihadapi dari permasalahan limbah terhadap lingkungan, PG Djatirito telah melakukan pengklasifikasian biaya lingkungan dan telah melakukan tahapan perlakuan akuntansi biaya lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatwadi (2016) menunjukkan bahwa RSUD Kota Mataram telah menerapkan konsep Green Accounting walaupun belum maksimal. Penelitian ini juga menghasilkan model pelaporan berbasis green accounting yang diharapkan mampu memberikan kepuasan semua stakeholder. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Putu Anik Yuliantini (2017) yang meneliti penerapan akuntansi lingkungan pada BUM Desa, menunjukkan bahwa tidak terdapat perlakuan khusus terhadap biaya-biaya lingkungan pada BUM Desa Tajun dan belum menerapkan akuntansi lingkungan secara sempurna. Padahal dampak dari penerapan akuntansi lingkungan ini dapat memudahkan dalam menganalisis komponen biaya lingkungan pengelolaan limbah dan membantu dalam mengambil keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Zulhaimi (2015) tentang pengaruh green accounting terhadap kinerja perusahaan, hasilnya adalah terdapat kenaikan earning dan harga saham setelah penerapan green accounting dan hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan para ahli. Dan green accounting ini terbukti memberikan manfaat bagi perusahaan. Kemudian penelitian dilakukan oleh Hendry Jaya (2015) menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan akuntansi biaya lingkungan namun penerapannya belum maksimal. Perusahaan mengakui biaya lingkungan sebagai biaya limbah yang disajikan di laporan laba rugi sebagai biaya diluar usaha yang dapat mempengaruhi serta dapat mengurangi laba pada perusahaan.

Sebuah perusahaan dikatakan memiliki kepedulian terhadap permasalahan lingkungan hidup jika perusahaan memiliki perhatian terhadap permasalahan lingkungan hidup disekitarnya, kemudian perusahaan juga memiliki keterlibatan dalam peduli lingkungan hidup atau konservasinya yang harus disertai dengan pelaporan akuntansi lingkungan yang ada di perusahaan. Serta adanya audit lingkungan yang dengannya efektivitas dan efesiensi dari program peduli lingkungan tersebut diukur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah penerapan green accounting pada PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun gunung Para sebagai perusahaan industri yang bahan bakunya dihasilkan dari sumber daya alam yang berpotensi menghasilkan limbah dan memerlukan pelaporan akuntansi lingkungan dengan judul **“Analisis Penerapan Green Accounting Di PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Semakin maraknya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan industri.
2. Masih banyak kegiatan-kegiatan industri yang belum sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan belum menerapkan green accounting dalam kegiatan operasionalnya.
3. Terjadi pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah pengolahan pabrik PTPN III Kebun Rambutan dan kebun Gunung Para yang menyebabkan kerugian pada warga sekitar.
4. PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para belum melakukan perincian khusus mengenai biaya lingkungan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan green accounting di PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para?
2. Bagaimana perlakuan PTPN III kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para dalam menangani pencemaran lingkungan yang terjadi?
3. Apakah Penerapan green accounting di PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para sudah sesuai dengan PABU yang meliputi PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan teori yang terkait?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan green accounting di PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para dalam menangani pencemaran lingkungan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan green accounting di PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para dengan PABU yang meliputi PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan teori yang terkait.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga dalam merumuskan, menganalisa, memecahkan masalah dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama belajar di perguruan tinggi.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pikiran berupa pembahasan dan saran untuk perusahaan serta dapat menambah

informasi dalam menerapkan green accounting yang berguna bagi perusahaan terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Serta menjadi alat ukur perusahaan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan lingkungan.

3. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca adalah untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan menambah wawasan dalam bidang akuntansi, dan keuangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Green Accounting

Akuntansi merupakan ilmu yang dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Seiring dengan perkembangan masa dimana kepedulian terhadap lingkungan mulai mendapat perhatian masyarakat, maka muncul wacana akuntansi sosial dan akuntansi lingkungan yang pada akhirnya memunculkan konsep *Socio Economic Environmental Accounting (SEEC)* yang merupakan penjelasan singkat pengertian *Triple Bottom Line* (Wiedmann dan Manfred, 2006) yang merupakan pelaporan akuntansi pada publik mencakup kinerja ekonomi, kinerja lingkungan serta kinerja sosial. SEEC ini merupakan perluasan wacana dari *Corporate Social Responsibility*. Jadi tidak sekedar mengelola permasalahan-permasalahan sosial seperti sumber daya manusia baik internal maupun eksternal seperti masyarakat, masalah sosial lain seperti beasiswa pendidikan, kepedulian sosial lainnya tetapi juga mengelola permasalahan lingkungan dan penyebab kerusakannya.

Green Accounting atau yang sering juga disebut dengan akuntansi lingkungan (*Environment Accounting*) merupakan praktek menggabungkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dan konservasi ke dalam praktek pelaporan yang meliputi analisa biaya dan manfaat. Akuntansi lingkungan adalah identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta

mengkomunikasikan hasilnya kepada para stockholders perusahaan (Astuti, 2002 dalam Wahyudi, 2012). Akuntansi lingkungan dalam Environmental Accounting Guidelines (EAG, 2005) didefinisikan sebagai berikut:

“Environmental accounting, as defined in these guidelines, aims at achieving sustainable development, maintaining a favorable relationship with the community, and pursuing effective and efficient environmental conservation activities. These accounting procedures allow a company to identify the cost of environmental conservation during the normal course of business, identify benefit gained from such activities, provide the best possible means of quantitative measurement (in monetary value or physical units) and support the communication of its results”.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa akuntansi lingkungan merupakan pengelompokan biaya yang dilakukan perusahaan dalam melakukan konservasi lingkungan ke dalam praktik bisnis perusahaan. Kegiatan konservasi lingkungan ini akan memunculkan biaya lingkungan yang harus ditanggung oleh pihak perusahaan. Akuntansi lingkungan juga dapat dianalogikan sebagai suatu kerangka kerja pengukuran yang kuantitatif terhadap kegiatan konservasi lingkungan yang dilakukan perusahaan. Konsep akuntansi lingkungan mulai berkembang sejak tahun 1970-an. Pada tahun 1990-an, IASC (*The International Accounting Standards Committee*) mengembangkan konsep tentang prinsip akuntansi internasional, termasuk di dalamnya pengembangan akuntansi lingkungan. AICPA (*American Institute Of Certified Public Accountant*) juga mengeluarkan prinsip-prinsip universal tentang audit lingkungan.

(Bell dan Lehman, 1999) mendefinisikan akuntansi lingkungan sebagai:
“Green accounting is one of the contemporary concepts in accounting that support the green movement in the company or organization by recognizing. Quantifying, measuring and disclosing the contribution of the environment to the

business process”. Sedangkan aktivitas dalam akuntansi lingkungan dijelaskan oleh Cohen dan Robbins (2011:190) sebagai berikut:

“Environmental accounting collects, analyzes, assesses, and prepares report of both environmental and financial data with a view toward reducing environmental effect and costs. This form of accounting is central to many aspects of governmental policy as well. Consequently, environmental accounting has become a key aspect of green business and responsible economic development”.

Definisi tersebut menerangkan bahwa akuntansi lingkungan merupakan mengumpulkan, menilai, dan mempersiapkan laporan dari data keuangan dan lingkungan dengan maksud untuk mengurangi efek lingkungan dan biaya lingkungan. Bentuk akuntansi lingkungan merupakan pusat bagi aspek pemerintah juga. Oleh sebab itu akuntansi lingkungan menjadi aspek kunci dari bisnis hijau dan pembangunan ekonomi yang bertanggung jawab. Melalui penerapan akuntansi lingkungan maka diharapkan lingkungan akan terjaga kelestariannya, karena dalam menerapkan akuntansi lingkungan perusahaan akan sukarela mematuhi kebijakan pemerintah tempat perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya.

2. Sejarah dan Perkembangan Green Accounting

Di Eropa konsep green accounting ini sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an, dimulai dari Norwegia yang terpengaruh dengan publikasi *Limits to Growth* (Meadows et al . 1972) dan gerakan lingkungan yang berkembang. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup Norwegia mengembangkan statistik untuk pengukuran sumber daya alam sebagai alat bantu yang lebih baik dalam mengelola sumber daya alamnya. Dimana ada ketakutan bahwa sumber daya alam mereka akan habis dikarenakan eksploitasi yang berlebihan. Lalu isu lingkungan

ini juga mendapat perhatian pemerintah Denmark sebagai akibat adanya krisis minyak tahun 1973 yang mulai membuat perhitungan cadangan energy dan penghematannya. Pada tahun 1980-an, Prancis mengembangkan sistem akuntansi untuk menilai baik secara kuantitatif maupun kualitatif keadaan dan perubahan atas sumberdaya alamnya (Vanoli 2005:344). Dari Belanda Roefie Hueting, yang mengembangkan dan berusaha untuk menerapkan ukuran pendapatan nasional berkelanjutan yang memperhitungkan perubahan dan penurunan aset lingkungan yang disebabkan kegiatan ekonomi. Kalau kita lihat upaya-upaya yang dilakukan pada tahap awal ini di beberapa Negara memiliki kesamaan dimana hanya terfokus untuk memperoleh gambaran data fisik dari penggunaan sumber daya alam.

Pada era tahun 1990-an International Accounting Standards Committee (IASC) pengembangan konsep tentang prinsip-prinsip akuntansi internasional yang meliputi pengembangan akuntansi lingkungan. Dan seiring meningkatnya standar industri yang diikuti berkembangnya auditor profesional seperti American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) mengeluarkan prinsip-prinsip universal tentang audit lingkungan. PBB lewat Coalition for Environmental Economies (CERES) dan UNEP pada tahun 1997, mengeluarkan Global Reporting Initiative (GRI), yang merupakan panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. GRI yang sampai dengan saat ini telah mengalami pembaharuan, isi pokoknya dapat dibagi menjadi enam bagian meliputi : ekonomi, lingkungan hidup, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, tanggung jawab produk, dan masyarakat. Kemudian pada tahun 2000 Kementerian Lingkungan Hidup Jepang

mengeluarkan Environmental Accounting Guidelines yang kemudian disempurnakan pada tahun 2002 dan 2005, dimana semua perusahaan di Jepang diwajibkan menggunakan akuntansi lingkungan.

3. Tujuan Penerapan Akuntansi Lingkungan

Menurut Ikhsan (2008), maksud dan tujuan dikembangkannya akuntansi lingkungan antara lain meliputi:

1. Sebagai alat manajemen lingkungan, akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan ringkasan dan klasifikasi biaya konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi lingkungan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Selain itu, akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menilai tingkat keluaran dan capaian tiap tahun guna menjamin perbaikan kinerja lingkungan yang harus berlangsung terus menerus.
2. Sebagai alat komunikasi dengan publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik. Tanggapan dan pandangan terhadap akuntansi lingkungan dari para pihak, pelanggan dan masyarakat digunakan sebagai umpan balik untuk merubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian atau pengelolaan lingkungan.

Di dalam akuntansi lingkungan ada beberapa komponen pembiayaan yang harus dihitung, misalnya:

- a. Biaya operasionalisasi bisnis yang terdiri dari biaya depresiasi fasilitas lingkungan, biaya memperbaiki fasilitas lingkungan, jasa atau pembayaran (*fee*) kontrak untuk menjalankan fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya tenaga kerja untuk menjalankan operasionalisasi fasilitas pengelolaan lingkungan serta biaya kontrak untuk pengelolaan limbah (*recycling*).
- b. Biaya daur ulang yang dijual, atau biasa juga disebut dengan “*Cost Incurred by upstream and down-stream business operations*”.
- c. Biaya penelitian dan pengembangan (Litbang) yang terdiri dari biaya total untuk material dan tenaga ahli, tenaga kerja lain untuk pengembangan material yang ramah lingkungan, produk dan fasilitas pabrik.

4. Pentingnya Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan dapat mendukung akuntansi pendapatan, akuntansi keuangan maupun bisnis internal akuntansi manajerial. Fokus utamanya didasarkan pada penerapan akuntansi lingkungan sebagai suatu alat komunikasi manajerial untuk pengambilan keputusan bisnis internal. Panduan yang menjadi tolak ukur pentingnya akuntansi lingkungan berkaitan dengan pertanggungjawaban akuntansi lingkungan itu sendiri. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United State Environment Protection Agency (US EPA)* dalam ikhsan (2008), peran akuntansi lingkungan adalah:

“Suatu fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para stakeholders perusahaan yang mampu mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan”.

Akuntansi lingkungan menjadi hal yang penting untuk dapat dipertimbangkan dengan sebaik mungkin karena akuntansi lingkungan merupakan bagian akuntansi atau sub bagian akuntansi. Alasan yang mendasarinya adalah mengarah pada keterlibatannya dalam konsep ekono dan informasi lingkungan.

5. Fungsi dan Peran Akuntansi Lingkungan

Fungsi dan peran akuntansi lingkungan (Ikhsan, 2008) dibagi ke dalam dua bentuk yaitu:

a. Fungsi Internal

Fungsi internal merupakan fungsi yang berkaitan dengan pihak internal perusahaan sendiri. Pihak internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha, seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi maupun jasa lainnya. Adapun yang menjadi actor dan faktor dominan pada fungsi internal ini adalah pimpinan perusahaan. Sebab pimpinan perusahaan merupakan orang yang bertanggungjawab dalam setiap pengambilan keputusan maupun penentuan setiap kebijakan internal perusahaan. Fungsi internal memungkinkan untuk mengatur biaya konservasi lingkungan dan menganalisis biaya dari kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan pengambilan keputusan. Dalam fungsi internal ini diharapkan akuntansi lingkungan berfungsi sebagai alat manajemen bisnis yang dapat digunakan oleh manager ketika berhubungan dengan unit-unit bisnis.

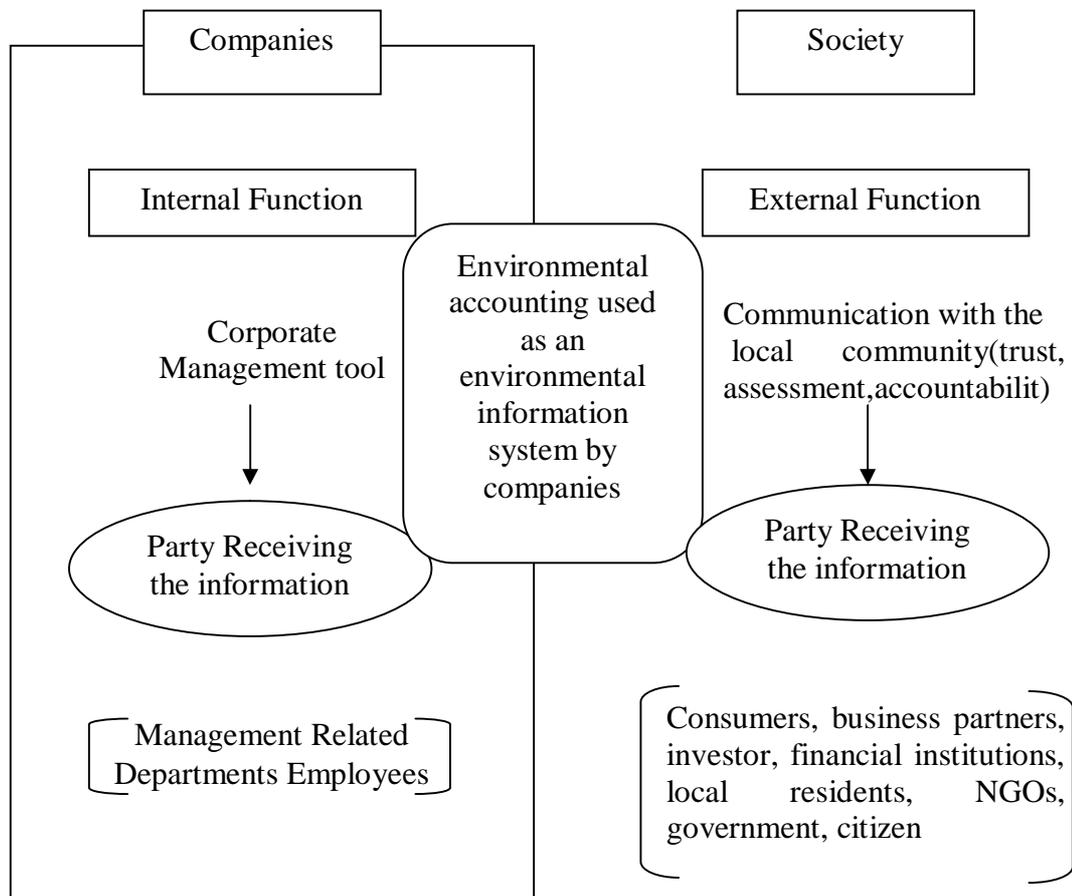
b. Fungsi Eksternal

Fungsi eksternal merupakan fungsi yang berkaitan dengan aspek pelaporan keuangan. SFAC No.1 menjelaskan bahwa pelaporan keuangan memberikan

informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara rasional. Informasi tersebut harus bersifat komprehensif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang rasional tentang kegiatan bisnis dan ekonomi dan memiliki kemauan untuk mempelajari informasi dengan cara yang rasional (paragraph 34).

Pada fungsi ini faktor penting yang perlu diperhatikan perusahaan adalah pengungkapan hasil dari kegiatan konservasi lingkungan dalam bentuk data akuntansi. Informasi yang diungkapkan merupakan hasil yang diukur secara kuantitatif dari kegiatan konservasi lingkungan. Fungsi eksternal member kewenangan bagi perusahaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan stakeholders, seperti pelanggan, rekan bisnis, investor, penduduk lokal maupun bagian administrasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Baik fungsi internal maupun eksternal pada dasarnya merupakan satu kesatuan utuh yang menghubungkan antar perusahaan dengan masyarakat.

Gambar II.1
Keterkaitan Fungsi Internal dan Eksternal Akuntansi lingkungan



Sumber: Ministry of the Environment Japan, 2005. Environmental Accounting Guidelines

6. Manfaat Akuntansi Lingkungan

Adapun manfaat diterapkannya akuntansi lingkungan menurut (Pramanik, et.al., 2007) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong pertanggungjawaban entitas dan meningkatkan transparansi lingkungan.
- b. Membantu entitas dalam menetapkan strategi untuk menanggapi isu lingkungan hidup dalam konteks dimana tuntutan LSM dan masyarakat yang semakin kuat atas isu-isu terkait lingkungan.

- c. Membangun citra yang lebih positif sehingga entitas dapat memperoleh pandangan yang baik dari masyarakat maupun kelompok aktivis penggiat lingkungan.
- d. Mendorong konsumen untuk membeli produk ramah lingkungan dan dengan demikian membuat entitas memiliki keunggulan pemasaran yang lebih kompetitif.
- e. Menunjukkan komitmen entitas terhadap usaha perbaikan lingkungan hidup.
- f. Mencegah opini negatif publik mengingat perusahaan yang berusaha pada area yang berisiko tidak ramah lingkungan pada umumnya akan menerima tantangan dari masyarakat.

7. Perbedaan Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Lingkungan

Akuntansi konvensional menurut Craig & Ben Gorgon (2001) dalam Rossje (2006) memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Mengidentifikasi entitas akuntansi
- b. Mengaitkan aktivitas ekonomi dari entitas akuntansi
- c. Mencatat kejadian ekonomi (economic events)
- d. Hanya diperuntukkan secara khusus untuk investor dan lainnya yang berkepentingan dengan entitas akuntansi (*Stockholder*).

Sedangkan karakteristik akuntansi lingkungan adalah:

- a. Mengidentifikasi kejadian ekonomi, sosial, dan lingkungan
- b. Entitas akuntansi
- c. Memperhatikan dampak kejadian ekonomi, sosial, dan lingkungan demi kelangsungan hidup organisasi perusahaan

- d. Menghasilkan informasi untuk para stakeholder seperti masyarakat, publik, karyawan atau buruh, generasi akan datang.

Akuntansi konvensional tidak memiliki perhatian terhadap transaksi-transaksi yang bersifat *non reciprocal transactions*, tetapi hanya mencatat transaksi secara timbal balik (*reciprocal transactions*). Sedangkan akuntansi lingkungan mencatat transaksi yang bersifat tidak timbal balik, seperti polusi, kerusakan lingkungan atau hal-hal negatif dari aktivitas perusahaan. Dalam sistem akuntansi lingkungan berorientasi pada flow yang mendasarkan pada analisis sebab dan akibat secara sistematis khususnya biaya yang terkait dengan output, seperti emisi, pembuangan sampah dan limbah yang dijadikan input perusahaan. Namun dalam akuntansi konvensional, biaya-biaya tersebut diberlakukan sebagai biaya overhead (*factory overhead cost*) dan dialokasikan secara terpisah.

8. Sifat Dasar Akuntansi Lingkungan

Sifat dasar akuntansi lingkungan (Fasua, 2011) diuraikan sebagai berikut:

- a. Relevan

Akuntansi lingkungan harus memberikan informasi yang valid terkait dengan manfaat biaya pelestarian yang dapat memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan stakeholder. Namun, pertimbangan harus diberikan kepada materialitas dan signifikan dari relevansi. Dalam akuntansi lingkungan, materialitas ditempatkan pada aspek kuantitas dan signifikansi ditempatkan pada aspek kualitas. Dari sudut pandang materialitas, perhatian diberikan kepada dampak kuantitatif dari data yang dinyatakan dalam nilai moneter atau unit fisik.

Sedangkan signifikansi berfokus pada kualitas informasi dari sudut pandang pelestarian lingkungan atau dampak masa depan yang dibawanya.

b. Handal

Akuntansi lingkungan harus menghilangkan yang tidak akurat atau bias dan dapat memberikan bantuan dalam membangun kepercayaan dan keandalan stakeholder. Pengungkapan data akuntansi lingkungan harus akurat dan tepat mampu mempresentasikan manfaat biaya serta tidak menyesatkan. Pengungkapan informasi akuntansi lingkungan seharusnya tidak hanya menjadi formalitas belaka dari sekedar memenuhi persyaratan undang-undang yang berlaku. Bila perlu, perusahaan harus menentukan metode yang tepat dan sesuai dengan pengungkapan dan secara akurat dapat menggambarkan kegiatan lingkungan yang sebenarnya sedang dilakukan. Dalam hal pengungkapan informasi tersebut tidak sepenuhnya dikomunikasikan ketika mengikuti format yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku, informasi tambahan yang diperlukan harus disediakan untuk lebih menjelaskan realitas secara lengkap. Ruang lingkup akuntansi lingkungan harus diperluas ke semua hal yang bersifat material dan signifikan untuk semua kegiatan pelestarian lingkungan.

c. Mudah Dipahami

Dengan tujuan pengungkapan data akuntansi lingkungan yang mudah untuk dipahami, akuntansi lingkungan harus menghilangkan setiap kemungkinan timbulnya penilaian yang keliru tentang kegiatan perlindungan lingkungan perusahaan. Untuk memastikan bahwa informasi yang diungkapkan mudah dipahami bagi para pemangku kepentingan, kata-kata harus dibuat sesederhana

mungkin. Tidak peduli seberapa kompleks kandungannya, sangat perlu untuk mengungkapkan semua hal yang dianggap penting.

d. Dapat dibandingkan

Akuntansi dapat dibandingkan dari tahun ke tahun bagi sebuah perusahaan dan juga dapat dibandingkan antar perusahaan yang berbeda di sector yang sama. Penting untuk memastikan keterbandingan agar tidak menciptakan kesalahpahaman antara stakeholder. Namun, karena fakta bahwa pengungkapan akuntansi lingkungan bersifat independen dan berbeda-beda, perbandingan yang sederhana pun sulit dilakukan ketika terdapat perbedaan sektor bisnis dan jenis operasi. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus dimana metode yang kompleks telah dipilih dan ditetapkan dalam suatu pedoman untuk digunakan sebagai dasar untuk perbandingan, isi dari metode tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan ketelitian harus dilakukan agar tidak menghasilkan kesalahpahaman antara stakeholder.

e. Dapat Dibuktikan

Data akuntansi lingkungan harus diverifikasi dari sudut pandang objektif. Informasi yang dapat dibuktikan adalah hasil yang sama dapat diperoleh bila menggunakan tempat, standar, dan metode yang persis sama dengan yang digunakan oleh pihak yang menciptakan data.

9. Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan dapat disebut sebagai biaya yang muncul dalam usaha untuk mencapai tujuan seperti pengurangan biaya lingkungan yang meningkatkan pendapatan, meningkatkan kinerja lingkungan yang perlu dipertimbangkan saat

ini dan yang akan datang. Biaya lingkungan juga didefinisikan oleh Susenohaji, (2003) dalam Jaya (2015) sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang berlaku. Biaya lingkungan mencakup baik biaya internal (berhubungan dengan pengurangan proses produksi untuk mengurangi dampak lingkungan) maupun eksternal (berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan). Biaya lingkungan juga didefinisikan oleh Hansen dan Mowen (2007) sebagai biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Maka, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan. Sebelum informasi biaya lingkungan dapat disediakan bagi manajemen, biaya-biaya lingkungan harus didefinisikan.

Green cost atau biaya lingkungan mencakup seluruh biaya-biaya paling nyata dalam mengukur ketidakpastian. Pada dasarnya biaya lingkungan berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem, atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Biaya lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal dan berhubungan terhadap semua biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kerusakan lingkungan dan perlindungan. Biaya perlindungan lingkungan meliputi biaya untuk pencegahan, penjualan, perencanaan, pengendalian, pengalihan aksi dan perbaikan kerusakan yang dapat terjadi pada perusahaan dan berpengaruh pada pemerintah atau orang-orang. Konsep ini sesuai dengan biaya lingkungan perusahaan. Biaya eksternal yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan tetapi bukan internalisasi melalui peraturan dan harga tidak dipertimbangkan.

Definisi biaya lingkungan menurut *Environmental Protection Agency (EPA)* antara lain:

- a. Biaya lingkungan meliputi biaya-biaya dari langkah yang diambil, atau yang harus diambil untuk mengatur dampak-dampak lingkungan terhadap aktifitas perusahaan dalam cara pertanggungjawaban lingkungan yang disesuaikan dengan tujuan-tujuan lingkungan dan keinginan perusahaan.
- b. Biaya-biaya lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal dan berhubungan terhadap seluruh biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kerusakan lingkungan dan pengendalian.
- c. Biaya-biaya lingkungan adalah pemakaian sumber daya disebabkan atau dipandu dengan usaha-usaha (aktifitas) untuk:
 1. Mencegah atau mengurangi barang sisa dan polusi;
 2. Mematuhi regulasi lingkungan dan kebijakan perusahaan;
 3. Kegagalan memenuhi regulasi dan kebijakan lingkungan.

Menurut (Niap, 2006 dalam Dewi, 2016) komponen-komponen biaya lingkungan tersebut terdiri dari biaya tersembunyi (*hidden costs*), biaya konvensional (*conventional costs*), biaya kontijensi (*Contingent costs*), biaya citra (*image and relationship costs*), dan biaya eksternal (*social costs or externalities*).

10. Tahapan Perlakuan Alokasi Biaya Lingkungan

Sebelum mengalokasikan pembiayaan untuk pengelolaan dampak lingkungan seperti pengelolaan limbah, pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pencemaran suara dan efek sosial lainnya, perusahaan perlu merencanakan tahap pencatatan pembiayaan tersebut. Tahap-tahap ini dilakukan agar dalam

pengalokasian anggaran yang telah direncanakan untuk satu periode akuntansi dapat diterapkan dengan efektif dan efisien. Pencatatan pembiayaan untuk mengelola sampah-sampah yang dikeluarkan dari hasil sisa produksi suatu usaha dialokasikan dalam tahap-tahap tertentu yang masing-masing tahap memerlukan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tahap-tahap pencatatan itu dapat dilakukan sebelum periode akuntansi berjalan sesuai dengan proses produksi yang dilakukan perusahaan tersebut (Hadi, 2012 dalam Pertiwi, 2017).

Pencatatan untuk mengelola segala macam yang berkaitan dengan limbah sebuah perusahaan didahului dengan perencanaan yang akan dikelompokkan dalam pos-pos tertentu sehingga dapat diketahui kebutuhan riil setiap tahunnya. Pengelompokkan dalam tahap analisis biaya lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi

Pertama kali perusahaan akan menentukan biaya untuk pengelolaan biaya penanggulangan *eksternality* yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional usahanya adalah dengan mengidentifikasi dampak negatif tersebut. Sebagai contoh misalkan sebuah Rumah Sakit yang diperkirakan akan menghasilkan limbah berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus untuk hal tersebut mengidentifikasi limbah yang mungkin ditimbulkan antara lain: limbah padat, limbah cair, maupun radioaktif yang berasal dari kegiatan instalasi rumah sakit atau kegiatan karyawan maupun pasien (Hadi, 2012 dalam Pertiwi,2017).

Dalam akuntansi lingkungan pada umumnya menggunakan kata-kata seperti penuh (*full*), total (*total*), dan siklus hidup (*life cycle*). Istilah tersebut lebih cenderung menggunakan pendekatan tradisional dimana lingkup biaya melebihi

biaya-biaya lingkungan. Biaya lingkungan menurut (Susenohaji dalam Jaya, 2015) adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya pemeliharaan dan pergantian dampak akibat limbah dan gas buangan
- 2) Biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan
- 3) Biaya pembelian bahan baku hasil produksi
- 4) Biaya pengolahan untuk produk.

Biaya lingkungan juga dapat diidentifikasi dengan mengklasifikasikan menjadi empat kategori (Hansen dan Mowen, 2007) adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya Pencegahan Lingkungan (*Environmental prevention cost*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh aktivitas pencegahan adalah evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi atau menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, pelaksanaan penelitian lingkungan, pengembangan sistem manajemen lingkungan, daur ulang produk, dan pemerolehan sertifikasi ISO.
- 2) Biaya Deteksi lingkungan (*Environmental detection cost*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Standar lingkungan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan didefinisikan dalam tiga cara, yaitu peraturan pemerintah, standar sukarela (ISO 14001) yang dikembangkan

oleh *International Standards Organization*. Dan kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen. Contoh aktivitas deteksi adalah audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses agar ramah lingkungan, pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari pemasok, dan pengukuran tingkat pencemaran.

- 3) Biaya Kegagalan Internal Lingkungan (*Environmental Internal Failure Cost*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang digunakan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Biaya kegagalan internal terjadi untuk menghilangkan dan mengelola limbah dan sampah ketika diproduksi. Aktivitas kegagalan internal digunakan untuk memastikan bahwa limbah dan sampah yang diproduksi tidak dibuang ke lingkungan luar dan untuk mengurangi tingkat limbah yang dibuang sehingga jumlahnya tidak melewati standar lingkungan. Aktivitas kegagalan internal misalnya pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi, pengolahan dan pembuangan limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi fasilitas untuk memproduksi limbah, dan daur ulang sisa bahan.
- 4) Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (*Environmental External Failure Cost*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke lingkungan. Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi (*realize external failure cost*) adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. Biaya eksternal yang tidak direalisasikan (*unrealized external failure cost*) atau biaya sosial (*social cost*),

disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak luar perusahaan. Biaya sosial lebih lanjut dapat diklasifikasikan sebagai biaya yang berasal dari degradasi lingkungan dan biaya yang berhubungan dengan dampak buruk terhadap property atau kesejahteraan masyarakat.

Setiap biaya-biaya lingkungan yang ada, diklasifikasikan oleh perusahaan secara berbeda. Jadi setiap perusahaan masih memiliki pandangan berbeda dari penentuan biaya akuntansi lingkungan. Hal ini dikarenakan akan lebih memudahkan manajemen untuk lebih fokus dalam menentukan keputusan.

b. Pengakuan

Apabila sudah diidentifikasi selanjutnya diakui sebagai akun atau rekening biaya pada saat penerimaan manfaat dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut. Berdasarkan isi dari KDPPLK, pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 83 dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantulkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika:

- 1) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan; dan

2) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini dan karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan laba rugi, perhatian perlu ditujukan pada pertimbangan materialitas. Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu, misalnya, suatu aktiva secara otomatis memerlukan pengakuan unsur lain, misalnya penghasilan atau kewajiban.

Pengakuan beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aktiva tetap). Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama; misalnya, berbagai komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang.

Mengenai pengakuan biaya lingkungan ini terdapat pandangan dari Anne dalam artikel *The Greening Accounting* (Winarno, 2008 dalam Jaya, 2015) yang mengemukakan pandangannya bahwa pengalokasian pembiayaan untuk biaya pengelolaan lingkungan dialokasikan pada periode awal dan akan diakui pada saat menerima sejumlah nilai yang telah dikeluarkan.

c. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Menurut (Suwardjono dalam Jaya, 2016) pengukuran (*measurement*) adalah penentuan angka atau satuan pengukur terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu dari objek tersebut. Pada umumnya, perusahaan mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengelolaan lingkungan dengan menggunakan satuan moneter yang sudah ditetapkan sebelumnya dan sebesar yang dikeluarkan. Sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil perusahaan setiap periode.

Menurut Harahap (2001 : 369) metode-metode pengukuran informasi yang akan dilaporkan dalam *Socio Economic Reporting*, antara lain:

- 1) Menggunakan penelitian dengan menghitung “*Opportunity Cost Approached*”. Misalnya dalam menghitung environment cost dari pembuangan, maka dihitung berupa kerugian manusi dalam hidupnya, berapa berkurangnya kekayaan, berapa kerusakan wilayah disekitar lokasi dan lain sebagainya akibat pembuangan limbah. Total kerugian itulah yang menjadi environment cost perusahaan.
- 2) Menggunakan hubungan antara kerugian, missal dengan permintaan untuk barang perorangan dalam menghitung jumlah kerugian masyarakat.

- 3) Menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga. Misalnya, vonis hakim akibat pengaduan masyarakat akan kerusakan lingkungan dapat juga dijadikan sebagai dasar perhitungan.

Sedangkan menurut Harahap (2001 : 363), bentuk keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosialnya dapat berupa:

- 1) Lingkungan Hidup:
 - a) Pengawasan terhadap efek polusi
 - b) Perbaikan pengrusakan alam, konservasi alam
 - c) Keindahan lingkungan
 - d) Pengurangan suara bising
 - e) Penggunaan tanah
 - f) Pengelolaan sampah dan air limbah
 - g) Riset dan pengembangan lingkungan
 - h) Kerjasama dengan pemerintah
 - i) Pembangunan lokasi rekreasi
- 2) Membantu Masyarakat Lingkungan:
 - a) Membangun klinik kesehatan
 - b) Bantuan dana kepada masyarakat sekitar.

d. Pencatatan

Pencatatan biaya lingkungan dalam perusahaan berarti menggolongkan biaya-biaya dan dicatat sesuai dengan kebijakan perusahaan. Berikut ini contoh pencatatan biaya pengelolaan limbah:

Tabel II.1
Contoh Pencatatan Biaya Pengeloan Limbah Pada PG Djatirito

Dicatat sebagai persediaan:	
1. Pada saat barang diterima	
(Dr) 300.xx Pupuk Urea	xxx
(Cr) 140.00 Hutang Usaha	xxx
(pembelian secara kredit)	
Dicatat sebagai biaya:	
1. Pada saat pengebonan (barang digunakan user)	
(Dr) 514.62 Limbah Padat	xxx
(Cr) 300.xx Pupuk Urea	xxx
2. Untuk biaya analisa	
(Dr) Biaya Analisa	xxx
(Cr) Kas	xxx
3. Biaya Pembuangan (limbah padat)	
(Dr) 514.622 Biaya Pembuangan	xxx
(Cr) 100 Kas	xxx
(Biaya pembuangan merupakan komponen biaya instalasi limbah padat dan akan dijumlah dengan biaya lainnya dan dicatat pada rekening limbah padat dengan nomor perkiraan 514.62)	

Sumber. (Nilasari, 2014)

e. Penyajian

Berdasarkan PSAK No.1 paragraf 15 tentang penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK bahwa, laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan asset, liabilitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan Bab 1. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat laporan keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif, standar akuntansi biasanya memuat ketentuan tentang apakah suatu informasi atau objek harus disajikan secara terpisah dari laporan utama, apakah suatu informasi harus disajikan digabung dengan akun laporan keuangan yang lain, apakah suatu pos perlu dirinci, atau apakah suatu informasi cukup disajikan dalam bentuk catatan kaki. Perusahaan dapat menyajikan kepedulian lingkungan dalam laporan keuangan guna membantu menciptakan kesan positif terhadap perusahaan dimata pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Penyajian tentang biaya lingkungan belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Keuangan, maka dalam hal penyajian dapat mengacu pada PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, seperti terdapat pada PSAK No.1 Paragraf 7 berisi tentang:

“Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.”

Juga dalam paragraf 09, mengenai informasi tambahan dinyatakan bahwa:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi perusahaan industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup ini memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting.”

Lalu pada paragraf 16 menyebutkan bahwa:

“Apabila belum ada pengaturan oleh PSAK, maka pihak manajemen bisa menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.”

Kemudian dijelaskan juga pada PSAK No.1 bahwa:

“Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan paragraf 14 serta menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami”.

Menurut (Haryono dalam Jaya, 2016) Perusahaan dapat menyajikan kepedulian lingkungan dalam laporan keuangan guna membantu menciptakan kesan positif terhadap perusahaan dimata pemodal, pemerintah dan masyarakat. Model komprehensif yang dapat dijadikan sebagai alternatif model pelaporan keuangan lingkungan secara garis besar dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Model Normatif

Model ini berawal dari premis bahwa perusahaan akan membayar segalanya. Model normatif mengakui dan mencatat biaya-biaya lingkungan secara keseluruhan yakni dalam lingkup satu ruang rekening secara umum bersama rekening lain yang serumpun. Biaya-biaya serumpun tersebut disisipkan dalam sub-sub unit rekening biaya tertentu dalam laporan keuangannya.

2) Model Hijau

Model Hijau menetapkan biaya dan manfaat terutama atas lingkungan bersih. Selama suatu perusahaan menggunakan sumber daya, perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya sebesar konsumsi atas biaya sumber daya. Proses tersebut memaksa perusahaan menginternalisasikan biaya pemakaian sumber daya meskipun mekanisme pengakuan dan pengungkapan belum memadai dan kemudian melaporkan biaya tersebut

dalam laporan keuangan yang terpisah dari laporan keuangan induk untuk memberikan penjelasan mengenai pembiayaan lingkungan di perusahaannya.

3) Model Intensif Lingkungan

Model pelaporan ini mengharuskan adanya pelaksanaan kapitalisasi atas biaya perlindungan dan reklamasi lingkungan. Pengeluaran akan disajikan sebagai investasi atas lingkungan sedangkan aktiva terkait lingkungan tidak didepresiasi sehingga dalam laporan keuangan selain pembiayaan yang diungkapkan secara terpisah, juga memuat mengenai catatan-catatan aktiva tetap yang berhubungan dengan lingkungan yang dianggap sebagai investasi untuk lingkungan.

4) Model Aset Nasional

Model Aset Nasional mengubah sudut pandang akuntansi dari tingkat perusahaan (skala mikro) ke tingkat nasional (skala makro), sehingga dimungkinkan untuk meningkatkan tekanan terhadap akuntansi untuk persediaan dan arus sumber daya alam. Dalam model ini dapat ditekankan bahwa selain memperdulikan lingkungan dalam pengungkapannya secara akuntansi, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menginterpretasikan pembiayaan lingkungan tersebut sebagai aset nasional yang dipandang sebagai tanggung jawab secara nasional.

Variasi alternatif model dalam perbedaan materi yang diungkap antara perusahaan satu dengan perusahaan yang menganut model lainnya lebih banyak disebabkan oleh faktor tingkat kompleksitas dan tingkat kebutuhan masing-masing operasional usaha. Perusahaan dapat memilih alternative model varian

dalam menentukan sikap dan bentuk tanggung jawab sosialnya sesuai dengan proporsional masing-masing, namun secara substansial bahwa pertanggungjawaban lingkungan tetap menjadi pertimbangan utama setiap perusahaan.

f. Pengungkapan

Pengungkapan (*disclosure*) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan diartikan sebagai memberikan data yang bermanfaat karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tidak akan tercapai (Ikhsan, 2008). Akuntansi lingkungan menuntut adanya alokasi pos khusus dalam pencatatan rekening pada laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sehingga dalam pelaporan akuntansi keuangan akan muncul bahwa pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan tidak sebatas pada retorika namun telah sesuai dengan praktis pengelolaan sisa hasil operasional perusahaan.

Biaya yang dicatat dalam jurnal penjelas dapat diartikan bahwa biaya yang sebelumnya dicatat dalam pos gabungan seperti biaya umum atau overhead perlu untuk dibuatkan pos khusus yang memuat daftar alokasi biaya khusus untuk pengelolaan *eksternality* sebagai sisa hasil operasional usaha (Akbar, 2011 dalam Pertiwi, 2017). Kemungkinan untuk memuat seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam pos khusus menjadi sebuah neraca khusus tetap ada, namun meski demikian minimal dalam sebuah laporan keuangan adanya rekening khusus yang dapat menjelaskan alokasi biaya lingkungan tersebut menjadi satu kesatuan pos rekening yang utuh dan secara rinci pengeluaran biaya tersebut sejak awal

perencanaan proses akuntansi lingkungan sampai pada saat penyajian pemakaian biaya tersebut (Winarto,2007 dalam Pertiwi, 2017).

Mengacu pada PSAK No 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum yang juga mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), maka hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi sehubungan dengan perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya limbah dan metode penyusutan prasarana pengelolaan limbah
2. Kegiatan PLH yang telah dan yang sedang berjalan
3. Adanya kewajiban bersyarat sehubungan dengan PLH.

Berikut ini beberapa contoh format laporan biaya lingkungan:

Tabel II.2
Biaya Konservasi Lingkungan

Biaya Kegiatan Konservasi lingkungan "Kategori berhubungan dengan kegiatan bisnis"			
Kategori	Kunci Kegiatan dan Hasil	Investasi	Biaya
1. Biaya Area Bisnis			
Uraian	1-1] Biaya pencegahan polusi		
	1-2] Konservasi lingkungan global		
	1-3] Biaya sirkulasi sumberdaya		
2. Biaya upstream/downstream			
3. Biaya administrasi			
4. Biaya R & D			
5. Biaya kegiatan sosial			
6. Biaya penyelamatan lingkungan			
Total			

Sumber: Ikhsan, 2008

Tabel II.3
Laporan Biaya Lingkungan Tahun 2012

Biaya Lingkungan			Persentase dari biaya produksi
Biaya material dari output produk			
Biaya bahan bakar	11.433.360		0,54%
		11.433.360	
Biaya material dari output non-produk			
Biaya yang pemakaian bahan kimia untuk proses pemasakan dan pengelantangan	22.518.800		1,13%
Biaya pemakaian bahan kimia untuk mesin pulp	372.040		
Air	202.280		
		23.093.120	
Biaya control limbah dan emisi			
Biaya pengolahan limbah	92.774.360		4,54%
		92.774.360	
Biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan			
Biaya pemantauan lingkungan	850.200		0,041%
Biaya penghijauan	1.500		
		851.700	

Lanjutan Tabel II.3

Biaya pelatihan dan pengembangan			
Biaya pelatihan karyawan	70.000		0.003%
Biaya penyuluhan masyarakat	-		
		70.000	
Biaya tak berwujud			
Biaya sertifikasi lingkungan	-	-	-
Total		128.222.549	6,254%
Total biaya produksi 2.044.222.050			

Sumber: (Burhan, 2013)

Tabel II.4
Laporan Biaya lingkungan RSUD Kota Mataram
Periode 2015

No	Jenis Biaya Lingkungan	Tahun 2015	% dari Biaya operasi
1	Biaya Pencegahan Lingkungan	xxx	xxx
	Biaya pelatihan petugas Sanitasi	xxx	xxx
2	Biaya Deteksi Lingkungan	xxx	xxx
	Biaya Pemeriksaan Kualitas Air Limbah	xxx	xxx
	Biaya Pemeriksaan Kualitas Udara	xxx	xxx
	Biaya Pemeriksaan Kualitas Air Bersih (Air baku)	xxx	xxx
	Biaya Kegiatan Internal Lingkungan	xxx	xxx
3	Biaya Pembelian IPAL	xxx	xxx
	Biaya Pembelian Reagen atau Bahan Kimia	xxx	xxx
	Biaya Pembelian Kantong Plastik	xxx	xxx
	Biaya Pembelian Pewadahan Sampah (Organik, Anorganik, dan Limbah B3)	xxx	xxx
	Biaya Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam Pengelolaan Limbah Padat Medis dan Non Medis	xxx	xxx
	Biaya Jasa Pihak Ketiga (Rekayasa Cerobong Insinerator)	xxx	xxx
	Biaya Gaji Pengelolah Insinerator	xxx	xxx
	Biaya Gaji pengolah IPAL	xxx	xxx
	Biaya Gaji Pengolah Genset	xxx	xxx
	Biaya Pemeliharaan Insinerator	xxx	xxx
	Biaya Pemeliharaan IPAL	xxx	xxx
	Biaya Pemeliharaan Genset	xxx	xxx
	Biaya Listrik untuk Insinerator	xxx	xxx
Biaya Listrik untuk IPAL	xxx	xxx	
	Biaya Pembuatan Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	xxx	xxx
4	Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan	xxx	xxx
TOTAL		xxx	xxx

Sumber: (Fatwadi, 2016)

11. Peraturan yang Terkait Dengan Green Accounting

Dalam aturan hukum yang mengatur penerapan green accounting pada perusahaan swasta diatur dalam PP No. 47 Tahun 2012 yang merupakan tindak lanjut dari UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Dalam undang-undang disebutkan bahwa setiap perseroan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjalankan usahanya dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam (Lindrianasari, 2007).

Selain itu juga ada undang-undang yang mendasari kewajiban dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Dewi, 2016), antara lain:

- a. Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU ini mengatur tentang kewajiban setiap orang yang berusaha atau berkegiatan untuk menjaga, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai lingkungan hidup. Akibat hukum juga telah ditentukan bagi pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

- b. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam UU ini diatur kewajiban bagi setiap penanam modal berbentuk badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menjaga kelestarian hidup dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan, pembekuan, dan pencabutan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal.

- c. Keputusan Ketua Badan Pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau perusahaan Publik.

Keputusan ini mengatur mengenai kewajiban laporan tahunan yang memuat Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) harus menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

- d. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penetapan Peringkat Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum.

Dalam aturan ini aspek lingkungan menjadi salah satu syarat dalam pemberian kredit. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan kredit perbankan, harus mampu memperlihatkan kepeduliannya terhadap pengelolaan lingkungan. Standar pengukur kualitas limbah perusahaan yang dipakai adalah PROPER. Dengan menggunakan lima perangkat (hitam, merah, biru, hijau, dan emas) perusahaan akan diperingkat berdasarkan keberhasilan dalam pengelolaan limbahnya.

Adapun peraturan-peraturan lain terkait dengan pengelolaan lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- c. PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-51/MENLH/10/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kesehatan industri.
- e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

12. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai green accounting diantaranya terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel II.5
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
1	Putu Anik Yuliantini, Gusti Ayu Purnamawati, dan Nyoman Trisna Herawati (2017)	Analisis penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Badan Usaha Milik Desa	- Akuntansi Lingkungan	Hasilnya menunjukkan bahwa, tidak terdapat perlakuan khusus terhadap biaya-biaya lingkungan pada BUM Desa-desaja Tajun. Hanya menerapkan akuntansi lingkungan secara normative, sehingga dapat dikatakan belum menerapkan secara sempurna. Dampak yang dihasilkan dari akuntansi lingkungan adalah memudahkan dalam menganalisis komponen biaya lingkungan terkait pengelolaan limbah	e-Journal S1 Ak Uninersitas Pendidikan Ganesha Vol: 7 No: 1
2	Hanifa Zulhaimi (2015)	Pengaruh Penerapan Green Accounting Terhadap Kinerja Perusahaan	Variabel bebas: - Green Accounting Variabel Terikat: - Kinerja Perusahaan	Dari hasil pengujian terbukti bahwa terdapat kenaikan earning dan harga saham setelah penerapan green accounting, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan para ahli.	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol: 3, No: 1 Hal.603-616

Lanjutan Tabel II.5

3	Hendry Jaya (2015)	Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Terhadap Laba Perusahaan PT. Imeco Batam Tubular	- Akuntansi biaya lingkungan - Laba perusahaan	Perusahaan dalam menerapkan akuntansi biaya lingkungan sudah mengeluarkan biaya-biaya lingkungan dalam akuntansi perusahaannya yang tidak secara keseluruhan dan hanya mengakui sebagai biaya limbah, dimana biaya limbah disajikan di laporan laba rugi sebagai biaya dari luar usaha yang dapat mempengaruhi dan mengurangi laba perusahaan.	Jurnal Measurement Vol: 9, No: 1 ISSN : 2252-5394
4	Fatwadi, Lilik Handajani, dan Nur Fitrah (2016)	Voluntary Berbasis Green Accounting	- Voluntary Report - Green Accounting	Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Kota Mataram telah menerapkan konsep green accounting walaupun belum maksimal.	Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol : 7, No: 3 Hal. 370-387
5	Fitri Nilasari (2014)	Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah (PG Djatiroto)	- Akuntansi Lingkungan - Pengelolaan Limbah	Hasilnya adalah bahwa perusahaan telah melakukan pengklasifikasian biaya lingkungan (dalam hal pengelolaan limbah) dan telah melakukan tahapan perlakuan akuntansi biaya lingkungan.	Artikel ilmiah Mahasiswa Universitas Jember
6	Lindrianasari (2007)	Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan Dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan	- Kinerja Lingkungan - Kualitas Pengungkapan Lingkungan - Kinerja Ekonomi	Terdapat hubungan positif signifikan antara kinerja lingkungan dengan kualitas pengungkapan lingkungan dan tidak terdapat hubungan antara kinerja ekonomi dengan kinerja lingkungan, kinerja ekonomi dengan kualitas pengungkapan lingkungan.	JAAI Vol: 11, No: 2 Hal: 159-172

Lanjutan Tabel II.5

7	Santi Rahma Dewi (2016)	Pemahaman dan Kepedulian Penerapan Green Accounting: Studi Kasus UKM Tahu di Sidoarjo	- Green Accounting	Hasilnya adalah masih banyak industri yang tidak menyadari pada pelestarian lingkungan dan biaya, dan tidak ada yang benar-benar menerapkan konsep akuntansi hijau.	Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis & Call For Paper FEB UMSIDA 2016
8	Rilen Ninda Bangun (2013)	Pelaporan Biaya Lingkungan dan penilaian Kinerja Lingkungan	- Biaya Lingkungan - Kinerja Lingkungan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper belum membuat laporan biaya lingkungan. Penerapan laporan biaya lingkungan bermanfaat bagi manajemen dalam memperoleh informasi tentang biaya lingkungan yang telah ditimbulkan pada satu periode serta mengetahui bagaimana kinerja lingkungan perusahaan.	Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

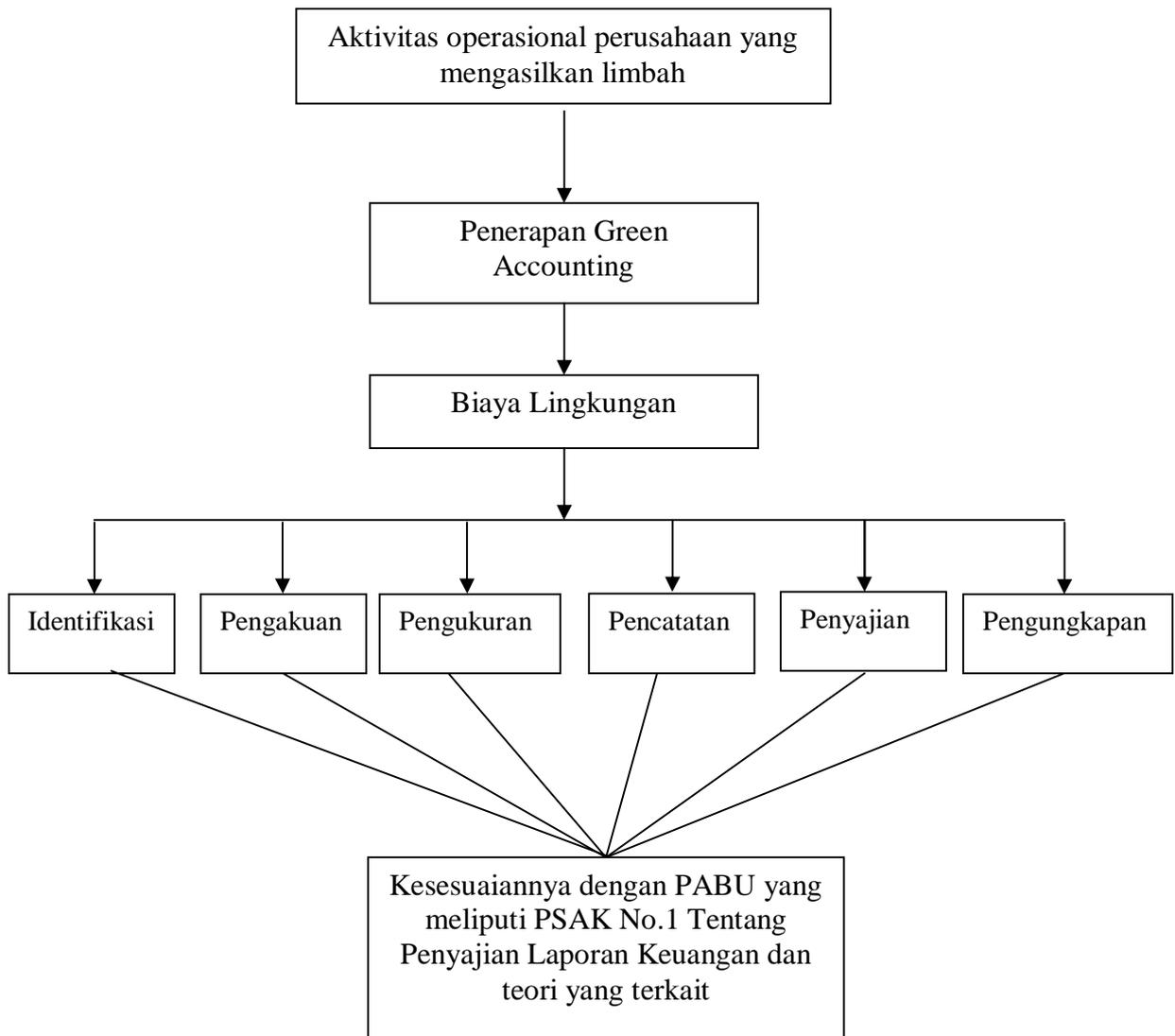
B. Kerangka Berpikir

Kebun Rambutan dan kebun Gunung para adalah dua komoditi usaha di PTPN III Persero dengan kegiatan operasionalnya menggunakan sumber daya alam, dimana dalam setiap kegiatan menghasilkan produk pasti menghasilkan limbah. Limbah diartikan sebagai sisa suatu usaha atau kegiatan produksi, limbah yang dihasilkan dari operasional perusahaan memiliki kemungkinan bahwa limbah tersebut berbahaya bagi lingkungan. Maka dari itu diperlukannya penerapan green accounting sebagai salah satu cara perusahaan menjaga eksistensi

perusahaannya dengan tidak hanya menguntungkan profit tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.

Green accounting ini adalah jenis akuntansi yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam hasil kegiatan usaha perusahaan. Biaya lingkungan adalah jenis biaya yang dikorbankan saat ini untuk mendapat manfaat di masa depan dalam hal pelestarian lingkungan. Biaya-biaya lingkungan ini memiliki beberapa tahapan berikut untuk mengontrol pengelolaan biaya-biaya lingkungan, seperti melakukan identifikasi biaya-biaya lingkungan dengan menentukan jenis biaya yang akan dikeluarkan, kemudian menganalisis pengakuan terhadap biaya lingkungan dan melakukan pengukuran. Setelah dilakukan pengukuran terhadap biaya hal selanjutnya adalah menganalisis metode yang digunakan dalam mencatat biaya biaya lingkungan tersebut. Biaya-biaya yang timbul dalam pengelolaan lingkungan ini berikutnya akan disajikan dan diungkapkan didalam laporan keuangan. Dan dari semua tahapan yang dilakukan, maka dianalisis kesesuaiannya dengan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Berdasarkan teori-teori yang sudah di cantumkan penulis yang terkait dengan green accounting, maka penulis membuat kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar II.2
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003 :54). Penelitian deskriptif ini menentukan dan melaporkan keadaan sekarang. Tujuan utama dari penelitian deskriptif ini merupakan gambaran yang secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan secara operasional dari variabel-variabel yang digunakan. Berikut akan diuraikan mengenai definisi operasional variabel dan pengukurannya:

1. Green Accounting

Green Accounting atau yang sering juga disebut dengan akuntansi lingkungan (*Environment Accounting*) merupakan praktek menggabungkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dan konservasi ke dalam praktek pelaporan perusahaan yang meliputi analisa biaya dan manfaat. Akuntansi lingkungan adalah identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para stockholders perusahaan. Di dalam green accounting terdapat green cost atau biaya lingkungan mencakup seluruh biaya-biaya paling nyata dalam mengukur ketidakpastian. Biaya

lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal dan berhubungan terhadap semua biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kerusakan lingkungan dan perlindungan. Biaya perlindungan lingkungan meliputi biaya untuk pencegahan, penjualan, perencanaan, pengendalian, pengalihan aksi dan perbaikan kerusakan yang dapat terjadi pada perusahaan dan berpengaruh pada pemerintah atau orang-orang.

Menurut (Niap, 2006 dalam Dewi, 2016) komponen-komponen biaya lingkungan tersebut terdiri dari biaya tersembunyi (*hidden costs*), biaya konvensional (*conventional costs*), biaya kontijensi (*Contingent costs*), biaya citra (*image and relationship costs*), dan biaya eksternal (*social costs or externalities*).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 2 komoditi dari PTPN III Persero, yaitu PTPN III kebun Rambutan, Jl. Ahmad Yamin-Tebing Tinggi, Tj. Marulak Hilir, Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, 20998. PTPN III Kebun Gunung Para, Dolok Merawan, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil data rekening biaya pengendalian lingkungan di PTPN III Kebun Rambutan dan PTPN III Kebun Gunung Para.

Tabel III.1
Perincian Waktu penelitian

No	Keterangan	Bulan																			
		Nov					Des				Jan					Feb				Mar	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2
	Pengajuan Judul	■	■																		
2	Pengurusan Izin Riset			■	■	■															
3	Pengumpulan Data					■	■														
4	Pengelolaan Data							■	■	■											
5	Bimbingan Proposal										■	■	■								
6	Seminar Proposal														■	■					
7	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi																■	■	■	■	
8	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis Data dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara berupa opini dari responden dimana data ini menggunakan sumber data primer. Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Kemudian jenis data lainnya berupa dokumen mengenai laporan limbah yang dihasilkan dan biaya-biaya lingkungan/limbah, laporan laba rugi, laporan luas lahan area PTPN III Khususnya Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para, dimana data ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis perusahaan, dan literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang di bahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada bagian yang menangani limbah. Sebelum membuat daftar wawancara, kisi-kisi wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel III.2
Kisi-Kisi Wawancara

No	Komponen	Elemen	Nomor Butir	Total
1	Green Accounting (Akuntansi Lingkungan)	Biaya Lingkungan	1,2,3	3
		Tahap Identifikasi	4,5,6,7,8,9,10	7
		Tahap Pengakuan	11,12,13,14	4
		Tahap Pengukuran	15,16,	2
		Tahap Pencatatan	17,18	2
		Tahap Penyajian	19	1
		Tahap Pengungkapan	20	1
		Total		20

2. Metode dokumentasi yaitu memperoleh data atau informasi dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan. Peneliti melakukan pengumpulan dokumentasi atas data profil perusahaan dan laporan tahunan perusahaan serta biaya-biaya yang terkait dalam pengelolaan limbah.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang hanya mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menafsirkan data sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Dan dalam penelitian ini tidak menentukan hipotesis.

Jika penulis hanya mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi dan menafsirkan data sehingga peneliti mengetahui mengenai masalah apa yang akan diteliti maka data yang akan digunakan peneliti adalah laporan biaya pengendalian lingkungan/ limbah di Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para.

Dalam penelitian ini untuk menganalisis penerapan green accounting pada perusahaan, langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengelompokkan setiap biaya-biaya lingkungan yang dicatat pada PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung para.
2. Menganalisis identifikasi biaya, pengakuan, pengukuran dan pencatatan, penyajian dan pengungkapan biaya-biaya lingkungan di Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para.
3. Melakukan wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan biaya-biaya lingkungan dan pengelolaan limbah di Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para.
4. Menyimpulkan penerapan biaya lingkungan dan pengoperasian perusahaan sudah sesuai atau belum dengan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara III disingkat PTPN III (Persero), merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet.

Sejarah perseroan diawali pada tahun 1958 dengan proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN). Pada tahun 1968 Perseroan Perkebunan Negara (PPN) direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT Perkebunan (Persero) pada tahun 1974. Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, pemerintah merestrukturisasi BUMN subsector perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi diawali dengan langkah penggabungan manajemen.

Tahun 1994 tiga BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan III (Persero), PT Perkebunan IV (Persero) dan PT Perkebunan V (Persero)

pengelolaannya ke dalam satu manajemen. Melalui Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, ketiga perseroan tersebut digabung dan diberi nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. Setelah implementasi Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2014 tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, Perusahaan menjadi perusahaan induk (*holding*) bagi PT Perkebunan Nusantara I,II dan IV sampai dengan XIV.

PTPN III memiliki beberapa kebun, diantaranya adalah Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para. Kebun Rambutan merupakan salah satu unit PTPN III yang memiliki 8 wilayah kerja yang dibagi berdasarkan afdeling, luas dari ke delapan afdeling tersebut berjumlah 4.329,75 halahan kelapa sawit dan 1.372,5 ha lahan dengan tanaman karet. Kebun Rambutan terletak di sekitar Kota Madya Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Kebun Gunung Para terletak di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Unit Kebun Gunung para mempunyai areal tanaman seluas 2.949,83 ha lahan dengan tanaman karet dan 552,44 ha lahan dengan tanaman sawit.

b. Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi PTPN III telah disetujui oleh Direksi dan Komisaris serta telah diusulkan pengesahannya oleh RUPS sesuai dengan surat Direksi Nomor 3.08/SKPTS/44/2014, Visi dan Misi tersebut dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014 yang telah disahkan dalam RUPS Persetujuan RKAP sesuai Risalah RUPS tanggal 24 Desember 2013.

Visi PTPN III (Persero) adalah menjadi perusahaan agri bisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata-kelola bisnis terbaik.

Misi PTPN III (Persero) adalah mengembangkan industry hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan; menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan; memperlakukan karyawan sebagai asset strategis dan mengembangkannya secara optimal; menjadikan perusahaan terpilih yang memberikan 'imal-hasil' terbaik bagi para investor; menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis; memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas; melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan.

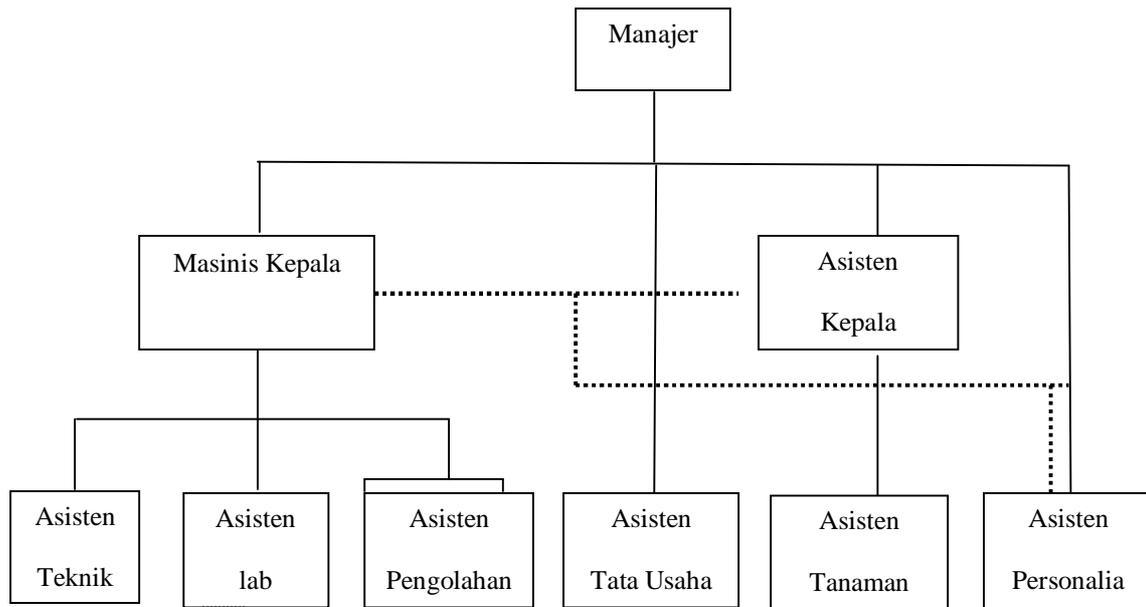
c. Struktur Organisasi Perusahaan

Untuk menjalankan kegiatannya, PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para menggunakan struktur organisasi yang disusun sedemikian rupa sehingga jelas terlihat batasan-batasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap personil dalam organisasi tersebut. Dengan demikian diharapkan adanya suatu kejelasan arah dan koordinasi untuk mencapai tujuan perusahaan dan masing-masing pegawai mengetahui dengan jelas darimana mendapat perintah dan kepada siapa harus bertanggung jawab atas hasil kerjanya.

Struktur organisasi yang dianut perusahaan ini adalah struktur organisasi lini atau garis. PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para membuat pembagian tugas berdasarkan jenis pekerjaan dan fungsi, dimana kegiatan-kegiatan yang sejenis atau fungsi-fungsi manajemen yang sama dikelompokkan ke dalam satu kelompok kerja. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab berjalan

vertikal menurut garis lurus mulai dari pimpinan tertinggi sampai pada bawahan masing-masing.

Struktur organisasi PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para dapat dilihat pada gambar 4.1.



Keterangan :

Level 1 = Strata VI
 Level 2 = Strata V
 Level 3 = Strata IV

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para

d. Kegiatan Produksi

1) Jenis Produk

Produk yang dihasilkan dari PTPN III PKS Rambutan adalah Minyak Sawit (*Crude Palm Oil*) dan Inti Sawit (*Palm Kernel*). Untuk hasil sampingan pengolahan (ampas) digunakan sebagai bahan bakar boiler dalam memproduksi uap. Sedangkan PTPN III PPK Gunung Para memiliki dua jenis pengolahan yaitu pabrik yang menghasilkan *Sheet* dan pabrik yang menghasilkan *Crumb Pubber*.

2) Bahan yang Digunakan untuk memproduksi Sawit dan Karet

a) Bahan Baku

Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk dan memiliki persentase yang relatif besar dalam produk dibandingkan dengan bahan-bahan lain. Bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan minyak sawit (CPO) dan inti sawit adalah tandan buah sawit yang sudah siap panen atau lebih dikenal dengan sebutan tandan buah segar. Sedangkan pada karet, bahan baku pada produk *Sheet* yang digunakan adalah *Latex* murni. Sedangkan bahan baku *Crumb Rubber* adalah kompo (karet yang sudah berbentuk gumpalan batok kelapa).

b) Bahan Tambahan

Bahan tambahan adalah suatu bahan pelengkap yang ditambahkan ke dalam proses pembuatan produk untuk meningkatkan citra atau mutu produk yang dihasilkan dan merupakan bagian dari produk akhir. Bahan tambahan pada PKS Rambutan hanya menghasilkan produk setengah jadi, maka tidak ada bahan tambahan yang digunakan. Sedangkan untuk produksi karet,

hahan tambahan yang digunakan adalah asam formit/semut dengan konsentrasi 3%-5%, cuka 7.5 kg/ton, amoniak 6.5 kg/ton. Sedangkan untuk menghasilkan *Crumb Rubber* tidak ada bahan yang ditambahkan.

c) Bahan Penolong

Bahan penolong adalah bahan yang diperlukan dalam proses produksi untuk menambah mutu produk. Bahan penolong yang digunakan pada pengolahan TBS adalah CaCO_3 untuk memisahkan cangkang dengan *nut* (inti sawit). Bahan penolong yang dipakai pada pengolahan karet adalah plastik dan kardus.

3) Proses Produksi PKS Rambutan dan PPK Gunung Para

Proses Produksi yang dilakukan di PKS Rambutan untuk menghasilkan minyak sawit (CPO) dan inti sawit dari bahan baku TBS adalah sebagai berikut:

a) Stasiun Penerimaan Buah

Hasil penerimaan TBS dari tiap afdeling diangkut ke pabrik menggunakan truk. Lalu dilakukan penimbangan untuk mengetahui jumlah TBS yang diterima. Kemudian TBS dibawa ke tempat penimbunan. TBS disortir untuk mengetahui kematangan buah. TBS kemudian dimasukkan ke dalam *loading ramp* dengan tujuan memudahkan pengisian ke dalam lori.

b) Stasiun Perebusan (*Sterilizing*)

Sterilizer adalah bejana uap tekan untuk merebus TBS dengan menggunakan uap dari BPV (*Back Pressure Vessel*). Proses perebusan berlangsung selama 90-110 menit. Sistem perebusan yang digunakan adalah perebusan tiga puncak.

c) Stasiun Pembantingan atau Penebalan (*Threshing*)

Pembantingan bertujuan untuk melepaskan buah dari janjangan setelah lori berisi buah yang sudah siap direbus diangkat dengan *Hosting Crane* dan menuangkannya ke dalam *automatic feeder (bunch feeder)* lalu buah akan jatuh ke dalam *thresher*.

d) Stasiun Pelumatan (*Digesting*) dan Pengepresan (*Pressing*)

Pelumatan bertujuan untuk melumatkan buah hingga hancur dan terpisah dari biji. Sedangkan pengepresan bertujuan untuk menekan daging buah yang hancur hingga keluar minyak kasar (*crude oil*).

e) Stasiun Pemurnian Minyak

Pemurnian minyak bertujuan untuk memperoleh minyak sawit yang sesuai dengan standar mutu yang dihasilkan. Pemurnian minyak terdiri dari beberapa proses yaitu: pemisahan minyak kasar dari pasir, penyaringan minyak kasar, pemanasan minyak kasar, pemisahan minyak dari *sludge*, penampungan minyak murni, pemurnian minyak, pengeringan minyak, penampungan minyak sawit (CPO), penampungan *sludge*, penyaringan *sludge*, pemisahan *sludge* dari pasir, pemisahan minyak dari *sludge*, pengambilan minyak kembali.

f) Stasiun Pengolahan Biji (*Kernel Plant*)

Pengolahan biji bertujuan untuk memperoleh inti sawit yang sesuai dengan kadar mutu produk yang dihasilkan. Ada beberapa tahapan yaitu: *Cake Breaker Conveyor, Depericarper, Nut Polishing Drum, Nut Silo, Ripple Mill, Kernel Grading Drum, Light Tenera Dust Separation, Hydrocyclone, Kernel Silo, Kernel Storage*, pengeringan inti sawit.

Proses produksi yang dilakukan PPK Gunung Para untuk menghasilkan *sheet* adalah sebagai berikut:

a) Bak Penerimaan

Latex yang datang dari kebun sebelum dimasukkan dalam *main* bak terlebih dahulu dilakukan pengukuran volume lateks dalam tangki dengan memakai talang ukuran dan kemudian penuangan lateks ke *main* bak harus disaring dan ditampung dalam *main* bak penampungan yang juga berfungsi untuk tempat pengenceran lateks. Penerimaan lateks di pabrik harus ditentukan kadar karet keringnya *Dry Rubber Counteen* (DRC) dengan menggunakan alat *metrolac*.

b) Pembekuan/Koagulasi

Setelah lateks diencerkan sampai 15% kemudian dialirkan melalui *gutter* (talang) dan dimasukkan ke dalam bak pembekuan setelah terlebih dahulu melewati saringan. Setelah permukaan lateks mencapai ketinggian tertentu, aliran lateks dihentikan dan pindah ke bak berikutnya. Busa yang terbentuk pada permukaan lateks harus diambil dengan alat serok. Tambahan asam formit/semut 500 cc – 600 cc dengan konsentrasi 3% - 5% bak pembekuan, waktu pembekuan 6-8 jam.

c) Penggilingan

Penggilingan dilakukan dengan gilingan *sheet* yang konstruksinya terdiri dari 6 buah rol yang disebut "*six in one*" giliran rol 1 sampai dengan 5 rolnya licin (tidak berbunga) sedangkan giliran rolnya terakhir atau *finisher* rolnya diberi berbunga (*grooving*).

d) Penirisan di Lori

Sebelum dimasukkan ke dalam kamar pengasapan terlebih dahulu lembaran *sheet* dikeringkan di udara bebas selama 2 jam dengan tujuan mengurangi kadar air sehingga mempercepat proses pengeringan di dalam kamar asam.

e) Pengeringan dan Pengasapan (Kamar Asap)

Tujuan pengeringan adalah untuk menurunkan kadar air sehingga didapat *sheet* yang kering, agar kondisi mutu dapat dipertahankan selama penyimpanan dan pengangkutan. Sedangkan fungsi asap adalah untuk memberikan warna coklat terang pada *sheet* dan untuk mencegah pertumbuhan spora/jamur.

f) Sortasi

Tujuan dilakukan sortasi adalah untuk memisahkan antara RSS I, RSS II, RSS III dan *Cutting*. Setelah proses pemisahan *sheet* selanjutnya dipress dengan menggunakan mesin press hidrolik.

g) Pengepakan (*packing*)

Pembungkusan dilakukan dengan menusuk-nusuk lembaran pembungkus dengan alat tusuk dari baja yang runcing, sehingga pembungkusan benar-benar melekat. Setelah selesai pembungkusan, *ball* tersebut di kapur.

h) Gudang Produksi

Setelah proses pembungkusan, *sheet* disimpan di gudang produksi sebelum dipasarkan.

4) Pengolahan Limbah Produksi PKS Rambutan dan PPK Gunung Para

a) PKS Rambutan

Limbah yang dihasilkan di PKS Rambutan berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa cangkang dan fibre yang digunakan sebagai bahan bakar boiler, tandan kosong dimanfaatkan kembali sebagai pupuk untuk tanaman. Limbah cair yang dihasilkan harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan dan tidak dapat dibuang secara langsung ke sungai karena dapat mencemari sungai. Parameter yang menjadi indikator control untuk membuang limbah cair adalah angka *Biological Oxygen Demand* (BOD). Angka BOD adalah angka yang menunjukkan kebutuhan oksigen yang biasanya diukur dalam periode 5 hari, sedangkan angka *Chemical Oxygen Demand* (COD) adalah angka yang menunjukkan suatu ukuran apakah oksidasi secara kimia dapat terjadi.

Tahapan pengolahan limbah di PKS Rambutan adalah sebagai berikut:

(1) Pendinginan

Limbah cair yang telah dikutip minyaknya pada *oil trap* mempunyai karakteristik pH : 4 – 4,5 ; suhu 70 – 80 C, sebelum limbah dialirkan ke kolam pengasaman suhunya diturunkan menjadi 40 – 45 C agar bakteri *mesophilic* dapat berkembang dengan baik.

(2) Pengasaman

Setelah dari menara kolam pendinginan, limbah akan mengalir ke kolam pengasaman yang berfungsi sebagai proses prakondisi bagi limbah sebelum masuk ke kolam anaerobic.

(3) Resirkulasi

Ini dilakukan dengan mengalirkan cairan dari kolam anaerobik yang berakhir ke saluran masuk kolam pengasaman yang bertujuan untuk menaikkan pH dan membantu pendinginan.

(4) Proses Anaerobik

Dari kolam pengasaman limbah akan mengalir ke kolam anaerobik primer. Karena pH dari kolam pengasaman masih rendah, maka limbah harus dinetralkan dengan cara mencampurnya dengan limbah keluaran dari kolam anaerobik dengan cara resirkulasi pada hari masukan kolam anaerobik. BOD limbah pada kolam anaerobik primer masih cukup tinggi, maka limbah diproses lebih lanjut pada kolam anaerobik sekunder.

(5) Proses Fakultatif

Proses yang terjadi pada kolam ini adalah proses penonaktifan bakteri anaerobik dan prakondisi proses aerobik. Aktivitas ini dapat diketahui dengan indikasi pada permukaan kolam tidak dijumpai *scum* dan cairan tampak kehijau-hijauan.

(6) Proses Aerobik

Pada kolam ini telah tumbuh ganggang dan mikro *heterotrop*, yang membentuk *flocs*. Hal ini merupakan proses penyediaan oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba, dalam kolam metode pengadaan oksigen dapat dilakukan secara alami dan atau menggunakan aerator.

(7) Masa Tinggal

Dan dari serangkaian di atas, masa tinggal limbah selama proses berlangsung mulai dari kolam pendinginan sampai air limbah dibuang ke badan penerima kebutuhan waktu masa kurang lebih 100 hari.

Proses pengolahan dan pengendalian limbah di PKS Rambutan menggunakan sistem *land application* dan dalam pendistribusiannya bekerja sama dengan pihak Kebun Rambutan.

b) PPK Gunung Para

Limbah yang dihasilkan berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa sisa-sisa proses dari pengolahan *sheet* berupa lateks yang menggumpal pada *rubber trap* (perangkap getah khusus untuk *sheet*) yang terdiri dari 6 bak dan 12 bak khusus untuk *crumb rubber*.

Seluruh aliran keluar dari *rubber trap* dialirkan menjadi satu aliran yang diteruskan menuju kolam-kolam pengolahan limbah, didalam saluran yang berbentuk parit, parit tersebut diberi saringan untuk menangkap potongan kecil dari pengolahan karet. Selanjutnya dapat di proses untuk pabrik yang lain dengan standar mutu di bawah pabrik karet PTPN III Kebun Gunung Para.

Kolam limbah terdiri dari 3 kolam dengan 3 tahap penetralan, yaitu:

(1) Kolam *Innet*

Kolam ini berukuran 100 x 30 x 5 m, berfungsi sebagai pengolahan limbah tahap awal dengan penggunaan tanaman seperti enceng gondok untuk mengendalikan kadar. Pada saluran dipasang pipa dengan diameter 30 cm.

(2) Kolam *Aerobic*

Kolam ini berukuran 60 x 35 x 5 m, berfungsi sebagai pengolahan limbah tahap selanjutnya dengan penggunaan air rotor terdiri dari 2 unit dengan prinsip kerja penggunaan baling-baling untuk menghasilkan gelembung udara yang sangat dibutuhkan mikroorganisme bakteri berkembang dan bakteri.

(3) Kolam *Outlet*

Kolam mini berukuran 100 x 30 x 5 m, berfungsi sebagai pengolahan limbah tahap akhir dengan penggunaan tanaman seperti enceng gondok untuk mengendalikan kadar. Pada saluran dipasang pipa dengan diameter 30 cm.

Setelah melalui 3 kolam, limbah yang telah dinetralkan dan telah memenuhi syarat dari KEP MENLH 5/X/1995 dapat dibuang ke lingkungan masyarakat dalam hal ini digunakan sungai sebagai pembuangan akhir.

2. Deskripsi Data

a. Identifikasi dan Komponen Biaya Lingkungan

Pada dasarnya, biaya lingkungan selalu berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Penggambaran biaya lingkungan pada perusahaan itu tergantung dari niat perusahaan itu sendiri untuk menggunakan informasi yang dihasilkan dari informasi biaya lingkungan. Biaya lingkungan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan akibat kerusakan lingkungan. Hal ini juga diungkapkan oleh Staff Tata Usaha/ finance PKS Rambutan dan PPK Gunung Para bahwasanya:

“Biaya lingkungan sebagai biaya-biaya yang timbul yang berkaitan untuk menanggulangi dampak lingkungan baik untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh operasional perusahaan maupun dampak sosial akibat kegiatan operasional perusahaan.”

Dalam proses operasional produksi operasional di PKS Rambutan dan PPK Gunung Para, setiap kegiatannya pasti menghasilkan limbah. PKS Rambutan dan PPK Gunung Para dalam pengelolaan limbah telah mengacu pada AMDAL dan berada dalam Pengawasan Departemen Lingkungan Hidup. Limbah cair yang dihasilkan akan dianalisa di laboratorium setiap bulan dan untuk pengujian kualitas udara dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. PKS Rambutan dan PPK Gunung Para menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan dalam mengidentifikasi limbah yang dihasilkan ini menjadi 2 bagian yaitu limbah padat dan limbah cair. PKS Rambutan dan PPK Gunung para hanya mengelola limbah cair, sedangkan limbah padat PKS Rambutan seperti tankos, cangkang, dan lain-lain dikelola pihak lain sesuai tender dan untuk PPK Gunung Para limbah padat cukup diendapkan dan dikeringkan kemudian dijual kembali. Untuk mengurangi dampak pencemaran PKS Rambutan dan PPK Gunung Para mempunyai izin pembuangan limbah dan sertifikasi hasil uji air limbah, perpanjangan sertifikat ini selalu dilakukan oleh masing-masing pabrik, limbah B3 yang dihasilkan oleh pabrik disimpan di tempat khusus didalam lokasi pabrik sehingga tidak bercampur dengan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan sekitar. Hal tersebut di atas, berdasarkan wawancara dengan bagian laboratorium di masing-masing pabrik. Kemudian untuk penanganan terhadap pencemaran yang pernah terjadi di PKS Rambutan pada tahun 2009 yang menyebabkan limbah cair milik PKS masuk ke persawahan

warga sehingga mengakibatkan gagal panen dan yang terjadi di PPK Gunung Para pada tahun 2017 dikarenakan curah hujan yang tinggi kolam IPAL pecah dan limbah cair yang dihasilkan mencemari sungai di lingkungan sekitar, berdasarkan hasil wawancara bahwasanya untuk penanganannya sebagai berikut:

”Upaya yang dilakukan bila terjadi kebocoran limbah, langkah pertama yaitu melaporkan sebab kebocoran TKP ke polisi dan dinas lingkungan hidup kemudian melaporkan ke kantor pusat serta menanggung biaya kerugian yang dialami masyarakat. Biaya yang dikeluarkan untuk ganti rugi ke masyarakat diakui sebagai beban dan untuk reparasi kolam IPAL diakui sebagai investasi IPAL.”

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PKS Rambutan dan PPK Gunung para dalam mengelola limbahnya terdapat beberapa item. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan bahwa biaya-biaya lingkungan ini masuk dalam akun rekening 422 tentang pengendalian lingkungan. Hal ini juga diungkapkan oleh asisten Laboraturium mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan:

“Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses pengolahan limbah itu terdiri dari biaya gaji petugas laboraturium, biaya bahan penolong, biaya listrik, biaya genset, pengangkutan limbah ke penampungan, biaya analisa air limbah, biaya reparasi bengkel alat-alat labor, biaya perlengkapan terpentin.”

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap laporan keuangan PKS Rambutan dan PPK Gunung Para telah mengeluarkan biaya-biaya pengendalian lingkungan. Elemen biaya lingkungan yang dimaksud terbagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- 1) PKS Rambutan
 - a) Gaji, Tunjangan, dan Beban Sosial Karyawan Pelaksana, berisi gaji dan premi karyawan pelaksana.

- b) Pemeliharaan mesin dan perlengkapan, berisi biaya tukang bengkel untuk pemeliharaan alat dan perlengkapan.
 - c) Listrik dan air, berisi biaya turbin dan biaya genset
 - d) Pembuangan limbah/sampah, berisi biaya pemeliharaan area limbah, reparasi saluran limbah, babat rumput limbah
 - e) Pengukuran/analisa, berisi biaya analisa air limbah, analisa limbah, gaji pemelihara area limbah
 - f) Lain-lain, berisi biaya-biaya lain yang mendukung pengendalian lingkungan.
- 2) PPK Gunung Para
- a) Gaji, tunjangan dan beban sosial karyawan pelaksana, berisi biaya gaji dan premi karyawan pelaksana
 - b) Pemeliharaan mesin dan perlengkapan, berisi biaya-biaya seputar pemeliharaan mesin dan perlengkapan
 - c) Bahan/barang pelengkap, berisi biaya bahan-bahan pelengkap dalam pengendalian lingkungan.
 - d) Pembuangan limbah/sampah, berisi biaya perpanjangan izin pembuangan limbah, biaya reparasi limbah IPAL
 - e) Pengukuran/analisa, berisi biaya pengujian kualitas air dan udara
 - f) Audit external, berisi biaya persiapan audit external, biaya jasa audit SNI sertifikasi produk
 - g) Lain-lain, berisi biaya-biaya koordinasi stakeholder IPAL, biaya pengangkutan dan pengelolaan limbah B3.

Kehadiran green accounting yaitu untuk menyempurnakan atau menutupi keterbatasan yang mungkin ada dalam praktek akuntansi saat ini, yang menjadi kendalanya adalah masih tidak adanya standar yang baku untuk mewajibkan setiap perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya terkait dengan penanganan limbah sehingga menciptakan keberagaman sistem pencatatan di masing-masing perusahaan.

b. Pengakuan

Pengakuan berkaitan dengan masalah suatu transaksi yang akan dicatat atau tidak dalam sistem pencatatan sehingga akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. PKS Rambutan dan PPK Gunung Para mengakui transaksi sebagai biaya apabila telah digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dalam mengelola lingkungan. Pengelolaan biaya lingkungan/limbah diambil dari rencana biaya tahunan atau anggaran. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan bagian tata usaha masing-masing pabrik, bahwa:

“Alokasi biaya pengolahan limbah dan biaya pengendalian lingkungan diambil dari rencana biaya tahunan atau anggaran. Anggaran diputuskan oleh kantor pusat dan biaya diakui apabila telah digunakan disertai dengan lampiran pembuktian pekerjaan.”

PKS Rambutan dan PPK Gunung para akan mencatat dan langsung mengurangi dari rencana anggaran satu tahun yang telah ditetapkan pada awal tahun periode. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, biaya yang dikeluarkan perusahaan dibebankan di beban diluar beban pokok produksi dan muncul di laporan laba rugi bergabung dengan akun lain di beban umum kebun.

Jika terjadi kebocoran limbah yang berasal dari bocornya kolam IPAL, biaya diakui sebagai beban untuk ganti rugi ke masyarakat dan diakui sebagai

investasi untuk perbaikan kolam IPAL, hal ini diungkapkan oleh staff tata usaha

PKS Rambutan dan PPK Gunung Para sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan bila terjadi kebocoran limbah, langkah pertama yaitu melaporkan sebab kebocoran TKP ke polisi dan dinas lingkungan hidup kemudian melaporkan ke kantor pusat. Biaya yang dikeluarkan untuk ganti rugi ke masyarakat diakui sebagai beban dan untuk reparasi kolam IPAL diakui sebagai investasi IPAL.”

c. Pengukuran

PKS Rambutan dan PPK Gunung Para dalam mengukur biaya pengelolaan limbah menggunakan satuan moneter berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan diambil dari realisasi anggaran periode sebelumnya. Hal ini didasarkan atas pernyataan bagian staff tata usaha:

“Dalam mengukur biaya limbah, perusahaan menggunakan rupiah, sesuai yang sudah dikeluarkan dan mengacu pada hasil rata-rata realisasi anggaran periode sebelumnya.”

Tabel IV.1
Pengukuran Biaya Lingkungan

Rekening	Nama Rekening	Pengukuran	Penilaian
422.00	Gaji, Tunj, beban sosial karyawan pelaksana	Historical Cost	Historical Cost
422.00	Pemeliharaan mesin dan perlengkapan	Historical Cost	Historical Cost
422.00	Listrik dan air	Historical Cost	Historical Cost
422.00	Pembuangan limbah/sampah	Historical Cost	Historical Cost
422.00	Pengukuran/analisa	Historical Cost	Historical Cost
422.00	Audit external	Historical Cost	Historical Cost
422.00	Lain-lain	Historical Cost	Historical Cost

Sumber: Diolah Peneliti

PKS Rambutan dan PPK Gunung Para memiliki IPAL yang digunakan sebagai alat penampung dan pengelolaan limbah dan dalam perlakuannya disajikan sebagai aktiva atau asset perusahaan. IPAL tersebut memiliki masa manfaat 20 tahun yang perhitungannya penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Jurnal yang digunakan untuk mencatat penyusutan tersebut adalah:

Beban Penyusutan IPAL	xxx
Akumulasi Penyusutan IPAL	xxx

Untuk menimbulkan biaya lingkungan harus terjadi transaksi yang menurunkan asset atau menimbulkan aliran keluar suatu aset. Dalam hal ini aset yang dimaksud adalah Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

d. Pencatatan

PKS Rambutan dan PPK Gunung Para melakukan pencatatan biaya pengelolaan limbah dalam rekening 422.00 dengan nama rekening bahan pelengkap, pemeliharaan mesin dan perlengkapan, listrik dan air, pembuangan limbah/sampah, pengukuran/analisa, audit external, dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam pencatatan masing-masing pabrik adalah *accrual basic*. Pabrik akan mencatat biaya apabila telah melakukan suatu kegiatan terhadap pengendalian lingkungan/limbah.

Tabel IV.2
Contoh Pencatatan Biaya Pengelolaan Limbah Pada PKS Rambutan dan PPK
Gunung Para

Dicatat Sebagai Biaya	
1. Pada saat membeli bahan/barang pelengkap	
422.00 Bahan/barang pelengkap	xxx
Kas/bank	xxx
(Dalam pembelian bahan/barang pelengkap ini akun rekeningnya hanya di PPK Gunung Para, sedangkan di PKS rambutan tidak memuat biaya pembelian bahan/barang pelengkap)	
2. Untuk biaya analisa	
422.00 Pengukuran/analisa	xxx
Kas/bank	xxx
(Untuk pengukuran/analisa pada PKS Rambutan termasuk didalamnya pengujian kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tanah. Sedangkan untuk PPK Gunung Para biaya analisa hanya termasuk pengujian kualitas udara, untuk pengujian kualitas air yang dilakukan setiap bulan masuk dalam rekening 260.00 pada bagian laboratorium dan masuk dalam biaya lain-lain)	
3. Untuk biaya pembuangan limbah/sampah	
422.00 Pembuangan limbah/sampah	xxx
Kas/bank	xxx
(Untuk biaya pembuangan limbah pada PKS Rambutan memuat biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuangan limbah/sampah, sedangkan pada PPK Gunung Para biaya yang terdapat dalam pembuangan ini hanya memuat	

8. Untuk biaya lain-lain		
422.00 Lain-lain		xxx
	Kas/bank	xxx
<p>(Biaya lain-lain ini memuat biaya-biaya yang mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan. Pada PPK Gunung Para dalam biaya lain-lain ini terdapat biaya pengangkutan limbah b3 yang akan dikelola oleh pihak lain, namun pada PKS Rambutan tidak memuat biaya tersebut. Kemudian untuk pencatatan biaya pengangkutan limbah padat yang dihasilkan oleh PKS Rambutan untuk dikelola pihak lain tidak dimunculkan pada rekening 422 ini)</p>		
Dicatat sebagai Investasi		
1. Pada saat perbaikan kolam IPAL		
Investasi		xxx
	Rekanan	xxx

Sumber: Diolah Peneliti

e. Penyajian

Penyajian berkaitan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan akan disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, biaya yang timbul dalam hal pengelolaan lingkungan/limbah pada PKS Rambutan dan PPK Gunung Para disajikan pada laporan keuangan umum perusahaan yaitu laporan laba rugi dimana termasuk dalam beban diluar beban pokok produksi dan masuk dalam pos beban umum kebun dan disajikan bersama-sama dengan biaya-biaya lain yang sejenis di dalam laporan laba rugi.

f. Pengungkapan

Pengungkapan berkaitan dengan masalah bahwa suatu informasi keuangan atau kebijakan akuntansi perusahaan tersebut diungkapkan atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, PKS Rambutan dan PPK Gunung Para tidak mengungkapkan biaya pengendalian lingkungan/limbah dalam Catatan Atas Laporan Keuangan melainkan hanya membuat evaluasi mengenai anggaran pengendalian lingkungan jika terjadi kenaikan atau melebihi anggaran. Pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan hanya dibuat oleh kantor pusat. Untuk penjelasan mengenai pengendalian lingkungan/limbah dijelaskan di Laporan Tahunan Tahun Buku pada kebijakan manajemen dan berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup (PLH) namun tidak memuat biaya-biaya yang terkait. Sedangkan penjelasan di Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan hasil penelitian biaya lingkungan ini termasuk biaya lain-lain dan pengungkapannya tidak dimuat di dalam CALK tersebut.

B. Pembahasan

1. Identifikasi Biaya Lingkungan dan Komponen yang Termasuk di Dalamnya

PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para merupakan unit kebun yang memproduksi sawit dan karet, dalam melaporkan biayanya untuk pengelolaan limbah dan pengendalian lingkungan diakui dalam pos biaya umum kebun.

Setelah melakukan penelitian berdasarkan bukti-bukti yang ada terkait terkait pengelolaan lingkungan maka dalam hal pengelolaan lingkungan hidup

PKS Rambutan dan PPK Gunung Para dalam mengelola limbahnya sudah sesuai dengan AMDAL dan sudah mengacu pada UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga mengacu pada PP No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, KEPMENLH No. KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kesehatan Industri, walaupun masih terdapat pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar, PKS Rambutan dan PPK Gunung Para sudah memenuhi tanggung jawab dengan memberikan biaya ganti rugi yang disebut dengan biaya sosial. Kemudian terkait dengan biaya-biaya lingkungan yang terdapat pada PKS Rambutan dan PPK Gunung Para, dapat diketahui bahwa PKS Rambutan dan PPK Gunung Para sudah mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan dengan kegiatan lingkungannya. Tetapi biaya-biaya tersebut belum diidentifikasi secara khusus oleh masing-masing pabrik. Berikut ini merupakan perbandingan antara identifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PKS Rambutan dan PPK Gunung Para dengan teori yang ada (Hansen & Mowen dan Susenohaji) pada tabel berikut.

Tabel IV.3
Perbandingan Identifikasi Biaya Lingkungan

No	Biaya Lingkungan Menurut Susenohaji	Biaya Lingkungan Menurut Hansen dan Mowen	Biaya Lingkungan Menurut PKS Rambutan	Biaya Lingkungan Menurut PPK Gunung Para
1	Biaya pemeliharaan dan pergantian dampak akibat limbah dan gas buangan	Biaya Pencegahan Lingkungan: Evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi atau menghapus	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Gaji, Tunjangan dan Beban Sosial Karyawan Pelaksana • Biaya Pemeliharaan Mesin dan Perlengkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Gaji, Tunjangan dan Beban Sosial Karyawan Pelaksana • Biaya Pemeliharaan mesin dan Perlengkapan

Lanjutan Tabel IV.3

		limbah, melatih karyawan, mempelajari dampak lingkungan, audit resiko lingkungan, pelaksanaan penelitian lapangan,	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Listrik dan Air • Biaya Pembuangan Limbah/Sampah • Biaya Pengukuran/Analisa • Biaya Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Bahan/Barang Pelengkap • Biaya Pembuangan Limbah/Sampah • Biaya Pengukuran/Analisa • Biaya Audit
		pengembangan sistem manajemen lingkungan, dan pemerolehan sertifikat ISO 14001		<ul style="list-style-type: none"> • Eksternal • Biaya Lain-lain
2	Biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan	Biaya Deteksi Lingkungan: Audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses (agar ramah lingkungan), pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan, dan pengukuran tingkat pencemaran		
3	Biaya pembelian bahan untuk bukan hasil produksi	Biaya Kegagalan Internal Lingkungan: Pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi,		

Lanjutan Tabel IV.3

		pengolahan dan pembuangan limbah-limbah beracun, dan pemeliharaan peralatan polusi		
4	Biaya pengelolaan untuk produk	Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan: Pembersihan		
		danau yang tercemar, penggunaan bahan baku dan energy secara tidak efisien, pembersihan minyak yang tumpah, pembersihan tanah yang tercemar, penyelesaian klaim kecelakaan pribadi dari praktek kerja yang tidak ramah lingkungan, penyelesaian klaim kerusakan property, dan pembaruan tanah keadaan		

Sumber : Diolah Peneliti

Dari hasil perbandingan di atas, dapat diketahui bahwa walaupun PKS Rambutan dan PPK Gunung Para belum melakukan klasifikasi biaya lingkungan yang terjadi seperti yang diidentifikasi Susenohaji dan Hansen & Mowen, namun setelah ditelusuri dari bukti-bukti yang ada dalam perusahaan dapat diketahui bahwa perusahaan sudah mencatat kegiatan lingkungannya. PKS

Rambutan dan PPK Gunung Para mengidentifikasi semua kegiatan produksi yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan perusahaan.

2. Mengakui Biaya Lingkungan

Setiap awal periode, masing-masing unit menerima rencana biaya yang telah ditetapkan untuk periode satu tahun berdasarkan rata-rata realisasi anggaran periode sebelumnya. Akan tetapi, pada dasarnya kas tersebut masih berbentuk alokasi anggaran (rencana biaya) yang masih belum dapat disebut sebagai biaya, karena pembiayaan untuk pengendalian lingkungan/limbah tersebut dilakukan setiap bulan dan pada akhir periode akuntansi akan dijumlahkan untuk dilaporkan pada laporan keuangan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Anne dalam artikel *The Greening Accounting* (Winarno, 2008 dalam Jaya 2015) yang mengemukakan pandangannya bahwa pengalokasian pembiayaan untuk biaya pengelolaan lingkungan dialokasikan pada awal periode dan baru akan diakui pada saat menerima sejumlah nilai yang telah dikeluarkan.

3. Mengukur Biaya Lingkungan

PKS Rambutan dan PPK Gunung Para dalam mengukur biaya pengendalian lingkungan/limbah menggunakan satuan moneter sebesar biaya yang dikeluarkan. Biaya tersebut diambil dari rata-rata realisasi periode sebelumnya atau sering disebut dengan metode *historical cost*. Pengukuran biaya pengendalian lingkungan/limbah dilakukan dengan menentukan besarnya jumlah rupiah yang akan dialokasikan pada suatu pos terkait dengan masing-masing jenis

pengendalian lingkungan yang dilakukan agar dapat diketahui seberapa besar jumlah yang akan dikurangkan dari rencana biaya dalam setiap awal periode. Walaupun belum ada peraturan yang mengatur pengukuran biaya lingkungan terkait pengelolaan limbah, perusahaan dapat menggunakan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan definisi yang diungkapkan oleh Suwardjono mengenai pengukuran. Berikut ini pengertian pengukuran menurut Suwardjono dan masing-masing pabrik.

Tabel IV.4
Pengukuran Biaya Lingkungan

Pengukuran Menurut Suwardjono	Pengukuran Menurut PKS Rambutan dan PPK Gunung Para
<p>Menurut Suwardjono pengukuran (<i>measurement</i>) adalah penentuan angka atau satuan pengukur terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu dari objek tersebut. Pada umumnya, perusahaan mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengelolaan lingkungan dengan menggunakan satuan moneter yang sudah ditetapkan sebelumnya dan sebesar yang dikeluarkan. Sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil perusahaan setiap periode.</p>	<p>Dalam mengukur biaya lingkungan perusahaan menggunakan satuan moneter berdasarkan kos yang dikeluarkan dan diambil dari realisasi anggaran periode sebelumnya.</p>

Sumber : Diolah Peneliti

Karena masih belum adanya standar khusus yang mengatur tentang pengukuran biaya lingkungan, maka dengan berdasarkan PSAK No. 01 dijelaskan bahwa:

“Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan paragraf 14 serta menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami”.

4. Pencatatan

Pencatatan yang dilakukan oleh PKS Rambutan dan PPK Gunung Para menggunakan metode *accrual basic*, dimana biaya yang diakui dan dicatat jika suatu kegiatan atau transaksi terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan tanpa memperhatikan kas diterima maupun kas dikeluarkan. Keunggulan dari metode ini adalah beban diakui saat terjadi transaksi sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum dikeluarkan atau diterima. Metode ini banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan menggunakan metode akrual ini.

Green Accounting menuntut adanya alokasi pos khusus dalam pencatatan rekening laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan yang dilakukan PKS Rambutan dan PPK Gunung Para tentang pengendalian lingkungan/limbah sudah masuk dalam rekening tersendiri yaitu rekening 422.00. Namun, ada beberapa hal yang kurang dalam pencatatan ini, seperti biaya analisis kualitas air dan gaji pelaksana pada PPK Gunung Para tidak dicantumkan dalam rekening ini dan dimuat dalam rekening 260.00 bagian laboratorium. Dan untuk

pencatatan pengangkutan limbah padat yang akan diolah oleh pihak lain di PKS Rambutan tidak memuat biaya tersebut.

(Jain, 1998 dalam Fatwadi, 2016) yang menyebutkan bahwa sistem pencatatan akuntansi lingkungan, memerlukan kamar tersendiri dalam neraca keseimbangan. Biaya yang dicatat dalam jurnal penjelas dapat diartikan bahwa biaya yang sebelumnya dicatat dalam pos-pos gabungan perlu dibuatkan pos khusus untuk pengelolaan *externality* sebagai sisa hasil operasional usaha (Munn, 1999 dalam Fatwadi, 2016).

5. Menyajikan Biaya Lingkungan

Standar Akuntansi Keuangan per 1 Januari 2009, PSAK No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mengungkapkan dalam paragraf 07, mengenai komponen Laporan Keuangan dinyatakan bahwa:

“Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.”

Juga dalam paragraf 09, mengenai informasi tambahan dinyatakan bahwa:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi perusahaan industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup ini memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting.”

Lalu pada paragraf 16 menyebutkan bahwa:

“Apabila belum ada pengaturan oleh PSAK, maka pihak manajemen bisa menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi

yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.”

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mengharuskan bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri yang berpotensi menghasilkan limbah untuk mengungkapkan aktivitas lingkungan yang terkait sangat erat dengan limbah produksi sebagai laporan tambahan untuk melengkapi laporan keuangan yang utama yang sudah diwajibkan. Penyajian biaya lingkungan ini di dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan nama rekening yang berbeda-beda sebab tidak ada ketentuan yang baku untuk nama rekening yang memuat alokasi pembiayaan lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Selama ini PKS Rambutan dan PPK Gunung Para menyajikan biaya lingkungan dalam kelompok beban diluar beban pokok produksi pada pos biaya umum kebun. Dalam pos biaya umum kebun itu pengendalian lingkungan ini bergabung dengan akun-akun lain yang sejenis dalam laporan laba rugi. PKS Rambutan dan PPK Gunung Para belum melaporkan dan menyajikan biaya lingkungan dalam laporan secara khusus. Kebijakan-kebijakan pengendalian lingkungan/limbah disajikan di laporan tahunan tahun buku tanpa menjelaskan biaya-biaya yang terkait. Dengan begitu para pengguna laporan keuangan akan mengalami kesulitan memahami pengalokasian biaya lingkungan karena tidak dijelaskan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berikut akan disajikan perbandingan penyajian biaya lingkungan menurut Haryono dengan masing-masing pabrik.

Tabel IV.5
Perbandingan Penyajian Biaya Lingkungan

	Model Penyajian Menurut Haryono	Model Penyajian Menurut Pabrik
1	<p>Model Normatif</p> <p>Model ini mengakui dan mencatat biaya-biaya lingkungan secara keseluruhan yakni dalam lingkup satu ruang rekening secara umum bersama rekening lain yang serumpun. Biaya-biaya serumpun tersebut disisipkan dalam sub-sub unit rekening biaya tertentu dalam laporan keuangannya</p>	<p>Biaya lingkungan disajikan secara keseluruhan dalam satu ruang lingkup rekening perusahaan secara umum bersama biaya lain yang sejenis.</p>
2	<p>Model Hijau</p> <p>Model ini menetapkan biaya dan manfaat tertentu atas lingkungan bersih.</p>	
3	<p>Model Intensif Lingkungan</p> <p>Model ini menetapkan pengeluaran akan disajikan sebagai investasi atas lingkungan sedangkan aktiva terkait lingkungan tidak didepresiasi.</p>	
4	<p>Model Aset Nasional</p> <p>Selain memperdulikan lingkungan dalam</p>	
	<p>pengungkapannya secara akuntansi,</p>	

Lanjutan Tabel IV.5

	perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menginterpretasikan pembiayaan lingkungan tersebut sebagai aset nasional.	
--	--	--

Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut perusahaan belum membuat laporan biaya lingkungan secara khusus, yang pada dasarnya perusahaan sudah mencantumkan item-item biaya lingkungan di laporan keuangan perusahaan dimana perusahaan cenderung menggunakan model normatif dalam penyajian biaya lingkungan yang dikeluarkan. Dari fakta tersebut bahwa sebenarnya perusahaan sudah mengukur, menilai, mengakui dan menyajikan serta mengungkapkan informasi tentang pengelolaan lingkungannya. Perusahaan membuat laporan tentang biaya lingkungan yang memiliki fungsi laporan biaya lingkungan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan ekonomi dapat digunakan secara maksimal.

Berikut ini disajikan contoh penyajian laporan biaya lingkungan dengan menganut teori identifikasi komponen biaya lingkungan Hansen dan Mowen seperti contoh laporan keuangan pada Fatwadi, 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.6
Contoh Laporan Biaya Lingkungan PKS Rambutan dan PPK Gunung Para

No	Jenis Biaya Lingkungan	Tahun 2015	% dari Biaya operasi
1	Biaya Pencegahan Lingkungan		
	Biaya pelatihan petugas Instalasi	xxx	xxx
2	Biaya Deteksi Lingkungan		

Lanjutan Tabel IV.6

	Biaya Pemeriksaan Kualitas Air Limbah	xxx	xxx
	Biaya Pemeriksaan Kualitas Udara	xxx	xxx
	Biaya Pemeriksaan Kualitas Air Bersih (Air baku)	xxx	xxx
3	Biaya Kegiatan Internal Lingkungan		
	Biaya Pemeliharaan IPAL	xxx	xxx
	Biaya Pemeliharaan Mesin dan Perlengkapan		
	Biaya Pembelian Reagen atau Bahan Kimia	xxx	xxx
	Biaya Pembelian Bahan/Barang pelengkap	xxx	xxx
	Biaya Pengangkutan Limbah Padat		
	Biaya Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam Pengelolaan Limbah Padat PKS Rambutan	xxx	xxx
	Biaya Perpanjangan Izin Pembuangan Limbah		
	Biaya Pengangkutan atau Pelangsiran Pembuangan Limbah		
	Biaya Jasa Pihak Ketiga atas Pengelolaan	xxx	xxx

	Limbah B3		
	Biaya Gaji pengolah IPAL	xxx	xxx
	Biaya Gaji Pengolah Genset	xxx	xxx
	Biaya Pemeliharaan IPAL	xxx	xxx
	Biaya Pemeliharaan Genset	xxx	xxx
	Biaya Listrik untuk IPAL	xxx	xxx
	Biaya Pembuatan Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	xxx	xxx
4	Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan	xxx	xxx
TOTAL		xxx	xxx

Sumber: Diolah Peneliti

6. Mengungkapkan Biaya Lingkungan

Sehubungan dengan biaya lingkungan dalam hal pengolahan limbah masuk ke dalam perhitungan beban di luar beban pokok produksi, PKS Rambutan dan PPK Gunung Para tidak mengungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan tentang kebijakan akuntansi yang diambil dan diterapkan oleh pabrik yang berkaitan dengan masalah pembebanan biaya limbah ke biaya umum kebun dan masuk ke dalam beban di luar beban pokok produksi. Masing-masing pabrik hanya membuat evaluasi terhadap anggaran jika terjadi kenaikan atau melebihi anggaran yang ditentukan, dan untuk Catatan Atas Laporan keuangan dibuat oleh kantor Pusat. Namun, kantor pusat tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan mengenai biaya lingkungan ini. Kantor Pusat hanya menjelaskan

Pengendalian Lingkungan/limbah yang dilakukan perusahaan di Laporan Tahunan Tahun Buku tanpa memuat biaya-biaya yang terkait.

Ditinjau dari pemberian informasi akuntansi, maka pengungkapan informasi lingkungan adalah untuk mengkomunikasikan antara seluruh transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan dengan pemakainya untuk pertimbangan ekonomis dan keputusan investasi yang rasional. Informasi yang disampaikan di Catatan Atas Laporan Keuangan sudah dapat menggambarkan secara relevan, dan dapat diandalkan, karena informasi yang ada sudah mencakup masalah kuantitatif atas biaya yang telah dan akan dikeluarkan sehubungan dengan *environmental expenditure* maupun informasi kualitatif tentang kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan.

Oleh karena itu, informasi yang dibuat oleh perusahaan dapat mencerminkan aktivitas perusahaan yang menyeluruh tentang usaha pengelolaan lingkungan hidup. Dan dari pengungkapan tersebut dapat memberikan kepuasan bagi *stakeholder* karena dapat mempertimbangkan keputusan investasi yang akan dilakukan serta lebih cepat untuk mengetahui permasalahan yang timbul selama periode tertentu. PKS Rambutan dan PPK Gunung Para sebaiknya mengungkapkan kebijakan tersebut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan mengenai dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan untuk mengkomunikasikan seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah dilakukan dan yang sedang berjalan sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan.

Mengacu pada PSAK No. 33 Tentang Akuntansi Pertambangan Umum yang juga mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), maka hal-hal yang wajib diungkapkan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi sehubungan dengan:
 - Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya limbah
 - Metode penyusutan prasarana pengelolaan limbah
- b. Kegiatan PLH yang sedang dilaksanakan dan yang sedang berjalan
- c. Adanya kewajiban bersyarat sehubungan dengan PLH

PTPN III dalam mengungkapkan pengendalian lingkungan/limbah dapat disimpulkan bahwa masih menjelaskan poin b dan c saja dan terdapat di laporan tahunan tahun buku. Sedangkan untuk mencantumkan biaya lingkungan dalam penyajiannya di laporan keuangan, para pemakainya belum dapat mengetahui secara benar jumlah dan nilai biaya untuk pengelolaan lingkungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang diuraikan dalam bab 4 (empat) berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dicapai maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Definisi biaya lingkungan menurut perusahaan adalah biaya-biaya yang timbul dan berkaitan untuk menanggulangi dampak lingkungan baik untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh operasional perusahaan maupun dampak sosial akibat kegiatan operasional perusahaan. Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang dijelaskan menurut Susenohaji dimana biaya lingkungan diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang dilakukan.
2. PKS Rambutan dan PPK Gunung Para dalam Pengelolaan Lingkungan sudah mengacu Pada AMDAL dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan KEPMENLH No. KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kesehatan Industri, dan dalam penanganan pencemaran lingkungan yang terjadi sudah melakukan tanggung jawab sosial dengan memberikan ganti rugi kepada masyarakat dan lingkungan.
3. PKS Rambutan dan PPK Gunung Para sudah mengeluarkan biaya-biaya lingkungan dalam akuntansi perusahaannya namun tidak secara

husus melakukan identifikasi biaya lingkungan yang terjadi seperti yang telah diidentifikasi oleh Susenohaji dan Hansen & Mowen.

4. PKS Rambutan dan PPK Gunung Para mengakui biaya-biaya lingkungan yang terjadi sebagai beban diluar beban pokok produksi. Biaya lingkungan dianggarkan pada awal periode dan diakui pada saat biaya tersebut digunakan untuk operasional pengelolaan lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anne dalam artikelnya.
5. Pengukuran yang dilakukan masing-masing pabrik adalah dengan menggunakan satuan moneter yang sebesar yang dikeluarkan perusahaan dan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Metode ini disebut dengan *historical cost*. Hal tersebut sesuai dengan definisi yang diungkapkan oleh Suwardjono terkait pengukuran.
6. Pencatatan yang dilakukan PKS Rambutan dan PPK Gunung Para adalah dengan menggunakan metode *accrual basic*. Dimana biaya yang diakui dan dicatat jika suatu kegiatan atau transaksi terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan tanpa memperhatikan kas diterima maupun kas dikeluarkan.
7. Dalam penyajian biaya-biaya lingkungan, PKS Rambutan dan PPK Gunung Para menyajikan dengan Model Normatif. Dimana model ini mengakui dan mencatat biaya-biaya lingkungan secara keseluruhan yakni dalam lingkup satu ruang rekening secara umum bersama rekening lain yang serumpun. Biaya-biaya tersebut masuk dalam beban diluar beban pokok produksi dalam sub biaya umum kebun. Karena biaya tersebut dikatakan sebagai biaya umum atau administrasi, bukan

dicatat sebagai biaya produksi yang dapat mengalokasikan biaya tersebut dalam sub beban pokok produksi.

8. Informasi yang berkaitan dengan biaya pengelolaan lingkungan belum diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. PKS Rambutan dan PPK Gunung Para:
 - a. Pabrik sebaiknya mengklasifikasikan biaya lingkungan yang lebih rinci seperti identifikasi yang dilakukan Susenohaji atau Hansen dan Mowen agar dapat mengontrol biaya yang dikeluarkan oleh pabrik serta lebih memudahkan dalam pengambilan keputusan.
 - b. Perusahaan sebaiknya menyempurnakan laporan keuangan yang telah ada sebelumnya, seperti contoh yang telah dibuat agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat bagi pengguna laporan keuangan.
 - c. Sebaiknya pabrik mengungkapkan terkait kebijakan-kebijakan akuntansi mengenai biaya-biaya lingkungan agar jelas pengalokasian biaya yg ditimbulkan.
2. Peneliti selanjutnya:
 - a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat membahas penerapan *green accounting* secara menyeluruh serta menambahkan sisi manajemen.

- b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menemukan standar pengukuran biaya lingkungan agar dapat diperbandingkan dengan kondisi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalah, Yousif Abdelbagi (2014). "Social and Environmental Accounting Research: The Way Forward". *International Journal of Economics and Management*. Vol. 8, No.2, hal 365-383.
- Adhitya Hilmawan (2016). "Akuntansi Lingkungan Dinilai Mampu Tingkatkan Laba Perusahaan". <https://m.suara.com/bisnis/2016>. Diakses 25 November 2017.
- Bangun, Rilen Ninda (2013). "Pelaporan Biaya Lingkungan dan Penilaian Kinerja Lingkungan". *Jurnal Program Studi Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dewi, Santi Rahma (2016). "Pemahaman dan Kepedulian Penerapan Green Accounting: Studi Kasus UKM Tahu di Sidiarjo". *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis*. FEB UMSIDA.
- Dina, Farah (2016). "Pengaruh Aktivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013". *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Environmental Accounting Guidelines (2005). *Ministry of the Environment*. Japan. Februari 2005.
- Fatwadi, dkk (2016). "Voluntary Report Berbasis Green Accounting". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Universitas Mataram. Vol: 7, No: 3, Hal: 370-387. Desember 2016.
- Hansen, Don. R. And Mowen, Maryanne M. (2007). *Management Accounting, 8th edition*. South western-thomson learning.
- Haryanti, Andi, dkk (2014). "Studi Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit". *Jurnal Konversi*. Universitas Mulawarman Samarinda. Vol: 3, No: 2. Oktober 2014.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, Arfan (2008). *Akuntansi Lingkungan dan Penerapannya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ikhsan, Arfan (2009). *Akuntansi Manajemen Lingkungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Jaya, Hendra (2015). "Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Terhadap Laba Perusahaan PT. Imeco Batam Tubular". *Jurnal Measurement*. Vol: 9, No: 1. Maret 2015.

- Juliandi, Azuar, dkk (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan : Umsupress.
- Kementerian Lingkungan Hidup. “Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan.” <https://proper.menlh.go.id/portal/>. Diakses pada 17 Januari 2018
- Kusumaningtias, Rohmawati (2013). “Green Accounting, Mengapa dan Bagaimana”. *Proceeding Seminar Nasional Dan Call For Paper Sancall*. Maret 2013.
- Latief (2016). “Biaya Lingkungan Dongkrak Laba Perusahaan?”. <https://edukasi.kompas.com>. Diakses pada 25 November 2017.
- Lindrianasari (2007). “Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia”. *JAAI*. Vol: 11, No: 2.
- Martdian Ratna Sari (2016). “Green Business to Green Accounting”. <https://swa.co.id>. Diakses pada 25 November 2017.
- Medan Bisnis (2016). “Air Limbah PTPN3 Sisumut Cemari Danau Tarutung”. <https://www.mdn.biz.id/n/209006>. Diakses pada 25 November 2017.
- Mulyani, Nita Sri (2013). “Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Pada Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT)”. *Skripsi*. Universitas Jember.
- Musyarofah, Siti (2013). “Analisis Penerapan Green Accounting di Kota Semarang”. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Nilasari, Fitri (2014). “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah”. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. Universitas Jember.
- Pertiwi, Siska Ayu Intan (2017). “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah (Studi Kasus Pada Pabrik Gula Semboro)”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Sindonews (2018). “Kumpulan Kasus Pencemaran Lingkungan yang disebabkan Oleh Perusahaan Industri”. <https://daerah.sindonews.com>. Diakses pada 17 Januari 2018.
- Sr. M. Maximiliana (2016). “Selamatkan Lingkungan dengan Green Accounting”. <https://jpicofmindonesia.com>. Diakses pada 25 November 2017.
- Widarti, Budi Nining, dkk (2015). “Degradasi COD Limbah Cair Dari Pabrik Kelapa Sawit Dalam Proses Pembentukan Biogas”. *Jurnal Integrasi Proses*. Vol: 5, No: 3. Desember 2015.

Yuliantini, Putu Anik, dkk (2017). “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Badan Usaha Milik Desa”. *e-journal SI Ak*, Universitas Pendidikan Ganesha. Vol: 7, No. 1.

Daftar Wawancara

(Jaya, 2015 dan Fatwadi, 2016)

No	Pertanyaan
1	Didalam proses pengolahan Limbah pasti membutuhkan biaya-biaya, apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan?
2	Apa definisi biaya lingkungan menurut perusahaan?
3	Apakah perusahaan sudah menerapkan proses pengolahan limbah sesuai dengan AMDAL?
4	Dalam proses produksi tersebut menghasilkan limbah apa saja?
5	Apakah pabrik mengelola sendiri limbah yang dihasilkan atau dikelola oleh pihak lain?
6	Jika dikelola pihak lain, apa saja jenis limbah yang dikelola?
7	Dimana lokasi pembuangan limbah yang dihasilkan?
8	Apakah limbah B3 disimpan di lokasi pabrik atau tempat khusus untuk menyimpannya?
9	Berapa kali pabrik melakukan pengujian kualitas air dan udara dalam setahun?
10	Apakah memiliki izin pembuangan limbah dan sertifikasi hasil uji air limbah?
11	Bagaimana perusahaan dalam mengalokasikan biaya lingkungan dalam satu periode dan kapan biaya lingkungan tersebut diakui?
12	Jika terjadi kebocoran limbah, upaya apa yang akan dilakukan Pabrik untuk menanganinya dan biaya yang dikeluarkan diakui sebagai biaya apa?
13	Selain biaya limbah, jenis biaya apa saja yang diakui perusahaan sebagai biaya lingkungan?
14	Apakah biaya biaya lingkungan diakui sebagai beban operasi atau beban luar usaha?
15	Berdasarkan apakah perusahaan mengukur biaya lingkungan yang dikeluarkan?
16	Apakah pengukuran biaya limbah sesuai dengan kebutuhan?
17	Bagaimana pencatatan biaya biaya lingkungan?
18	Metode apa yang digunakan dalam pencatatan biaya lingkungan?
19	Bagaimana perusahaan dalam menyajikan biaya lingkungan?
20	Bagaimana pengungkapan biaya-biaya lingkungan?

Kebun Rambutan

Narasumber : Bagian laboratorium

Waktu : Jumat, 2 februari 2018

Tempat : Pabrik Pengolahan Sawit Rambutan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Didalam proses pengolahan Limbah pasti membutuhkan biaya-biaya, apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan?	Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses pengolahan limbah itu terdiri dari biaya gaji petugas laboratorium, biaya bahan penolong, biaya listrik, biaya genset, pengangkutan limbah ke penampungan, biaya analisa air limbah, biaya reparasi bengkel alat-alat labor, biaya perlengkapan terpentin.
2	Apakah perusahaan sudah menerapkan proses pengolahan limbah sesuai dengan AMDAL.	Sudah, dengan adanya pengujian air limbah yang dilakukan setiap bulan dan sudah memenuhi baku mutu air limbah sesuai dengan KEP MENLH.
3	Dalam proses produksi tersebut menghasilkan limbah apa saja?	Limbah yang dihasilkan berupa limbah cair dan limbah padat. Limbah padat berupa cangkang, tankos, dan tatal.
4	Apakah pabrik mengelola sendiri limbah yang dihasilkan atau dikelola oleh pihak lain?	Pabrik mengolah sendiri limbah cair yang dihasilkan, limbah cair yang masih bisa dimanfaatkan diolah untuk pupuk lahan dikenal dengan land application.
5	Jika dikelola pihak lain, apa saja jenis limbah yang dikelola?	Limbah yang dikelola pihak lain berupa limbah padat seperti tankos dan cangkang serta B3.
6	Dimana lokasi pembuangan limbah yang dihasilkan?	Limbah yang dihasilkan ditampung di kolam penampungan limbah/IPAL untuk diolah kemudian setelah di olah dialirkan ke lingkungan dalam hal ini ke sungai.
7	Apakah limbah B3 disimpan di lokasi pabrik atau ada tempat khusus untuk menyimpannya?	Limbah b3 disimpan ditempat khusus di dalam lokasi pabrik. Jenis-jenis limbah b3 ini berupa bahan kimia tanaman (racun), bekas tinta, botol racun, seng bekas, dll.
8	Berapa kali pabrik melakukan pengujian kualitas air dan udara dalam setahun?	Melakukan pengujian kualitas air dilakukan setiap bulan dan pengujian kualitas udara dilakukan 2 kali dalam

		setahun.
9	Apakah memiliki izin pembuangan limbah dan sertifikasi hasil uji air limbah?	Ya, perusahaan memiliki izin pembuangan limbah dan sertifikasi hasil uji air limbah. Perpanjangan sertifikat ini selalu dilakukan oleh pabrik.

Rambutan, 2 Februari 2018

Diketahui Oleh

Bagian Laboratorium

Narasumber : Bagian Tata Usaha

Waktu : Jumat, 2 Februari 2018

Tempat : Pabrik Pengolahan Sawit Rambutan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa definisi biaya lingkungan menurut perusahaan	Biaya lingkungan bagi perusahaan adalah biaya-biaya yang timbul yang berkaitan untuk mengurangi dampak lingkungan baik untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan maupun dampak sosial akibat kegiatan operasional perusahaan.
2	Bagaimana perusahaan dalam mengalokasikan biaya lingkungan dalam satu periode dan kapan biaya lingkungan tersebut diakui?	Alokasi biaya pengolahan limbah dan biaya pengendalian lingkungan diambil dari rencana biaya tahunan atau anggaran. Anggaran diputuskan oleh kantor pusat dan biaya diakui apabila telah digunakan disertai dengan lampiran pembuktian pekerjaan.
3	Jika terjadi kebocoran limbah, upaya apa yang akan dilakukan Pabrik untuk menanganinya dan biaya yang dikeluarkan diakui sebagai biaya apa?	Upaya yang dilakukan bila terjadi kebocoran limbah, langkah pertama yaitu melaporkan sebab kebocoran TKP ke polisi dan dinas lingkungan hidup kemudian melaporkan ke kantor pusat. Biaya yang dikeluarkan untuk ganti rugi ke masyarakat diakui sebagai beban dan untuk reparasi kolam IPAL diakui sebagai investasi IPAL.
4	Selain biaya limbah, jenis biaya apa saja yang diakui perusahaan sebagai biaya lingkungan?	Biaya-biaya bahan pelengkap, perpanjangan izin pembuangan limbah, biaya audit external.
5	Apakah biaya biaya lingkungan diakui sebagai beban operasi atau beban luar usaha?	Biaya lingkungan masuk kedalam kategori beban diluar beban pokok produksi.
6	Berdasarkan apakah perusahaan mengukur biaya lingkungan yang dikeluarkan?	Dalam mengukur biaya limbah, perusahaan menggunakan rupiah, sesuai yang sudah dikeluarkan dan mengacu pada hasil rata-rata realisasi anggaran

		periode sebelumnya.
7	Apakah pengukuran biaya limbah sesuai dengan kebutuhan?	Ya, pengukuran biaya limbah sesuai dengan kebutuhan, dengan menggunakan progress report, ketentuan pekerjaan dan waktu yang ditentukan.
8	Bagaimana pencatatan biaya biaya lingkungan?	Biaya lingkungan dicatat apabila telah melakukan suatu kegiatan terhadap pengendalian lingkungan/limbah.
9	Metode apa yang digunakan dalam pencatatan biaya lingkungan?	Metode yang digunakan adalah accrual basic.
10	Bagaimana perusahaan dalam menyajikan biaya lingkungan?	Biaya lingkungan disajikan di laporan keuangan pada laporan laba rugi pada beban di luar beban pokok produksi sub rekening biaya umum kebun.
11	Bagaimana pengungkapan biaya-biaya lingkungan?	Pengungkapan biaya-biaya lingkungan merupakan kewajiban perusahaan dan di unit pabrik tidak ada membuat atau mengungkapkan tentang biaya pengendalian lingkungan/limbah ini di catat atas laporan keuangan, hanya melaporkan evaluasi mengenai anggaran pengelolaan jika terjadi kenaikan atau melebihi anggaran, dan kebijakan pengungkapan CALK adalah kebijakan dari kantor pusat.

Rambutan, 2 Februari 2018

Diketahui Oleh

Bagian Tata Usaha

Kebun Gunung Para

Narasumber : Bagian laboratorium

Waktu : Kamis, 1 februari 2018

Tempat : Pabrik Pengolahan Karet Gunung Para

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Didalam proses pengolahan Limbah pasti membutuhkan biaya-biaya, apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan?	Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses pengolahan limbah itu terdiri dari biaya gaji petugas laboratorium, biaya bahan penolong, biaya listrik, biaya genset, pengangkutan limbah ke penampungan, biaya analisa air limbah, biaya reparasi bengkel alat-alat labor, biaya perlengkapan terpentin
2	Apakah perusahaan sudah menerapkan proses pengolahan limbah sesuai dengan AMDAL.	Sudah, dengan adanya pengujian air limbah yang dilakukan setiap bulan dan sudah memenuhi baku mutu air limbah sesuai dengan KEP MENLH.
3	Dalam proses produksi tersebut menghasilkan limbah apa saja?	Limbah yang dihasilkan berupa limbah cair dan limbah padat. Limbah padat berupa sisa sisa karet dan limbah cair.
4	Apakah pabrik mengelola sendiri limbah yang dihasilkan atau dikelola oleh pihak lain?	Pabrik mengolah sendiri limbah cair yang dihasilkan, limbah cair yang masih bisa dimanfaatkan yang masih mengandung busa-busa karet disaring dan disimpan di kolam penyimpanan sampai mengendap dan dikeringkan kemudian dijual. Sedangkan limbah cair yang lain diolah untuk menyesuaikan pH air sesuai dengan ketentuan baku mutu air limbah sehingga jika dialirkan ke sungai tidak berbahaya lagi.
5	Jika dikelola pihak lain, apa saja jenis limbah yang dikelola?	Limbah yang dikelola pihak lain berupa limbah B3.
6	Dimana lokasi pembuangan limbah yang dihasilkan?	Limbah yang dihasilkan ditampung di kolam penampungan limbah/IPAL untuk diolah kemudian setelah di olah dialirkan ke lingkungan dalam hal ini ke sungai.

7	Apakah limbah B3 disimpan di lokasi pabrik atau ada tempat khusus untuk menyimpannya?	Limbah B3 disimpan ditempat khusus di dalam lokasi pabrik. Jenis-jenis limbah b3 ini berupa bahan kimia tanaman (racun), bekas tinta, botol racun, seng bekas, dll.
8	Berapa kali pabrik melakukan pengujian kualitas air dan udara dalam setahun?	Melakukan pengujian kualitas air dilakukan setiap bulan dan pengujian kualitas udara dilakukan 2 kali dalam setahun.
9	Apakah memiliki izin pembuangan limbah dan sertifikasi hasil uji air limbah?	Ya, perusahaan memiliki izin pembuangan limbah dan sertifikasi hasil uji air limbah. Perpanjangan sertifikat ini selalu dilakukan oleh pabrik.

Gunung Para, 1 Februari 2018

Diketahui Oleh

Bagian Laboratorium

Narasumber : Bagian Tata Usaha

Waktu : Kamis, 1 Februari 2018

Tempat : Pabrik Pengolahan Karet Gunung Para

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa definisi biaya lingkungan menurut perusahaan	Biaya lingkungan bagi perusahaan adalah biaya-biaya yang timbul yang berkaitan untuk mengurangi dampak lingkungan baik untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan maupun dampak sosial akibat kegiatan operasional perusahaan.
2	Bagaimana perusahaan dalam mengalokasikan biaya lingkungan dalam satu periode dan kapan biaya lingkungan tersebut diakui?	Alokasi biaya pengolahan limbah dan biaya pengendalian lingkungan diambil dari rencana biaya tahunan atau anggaran. Anggaran diputuskan oleh kantor pusat dan biaya diakui apabila telah digunakan disertai dengan lampiran pembuktian pekerjaan.
3	Jika terjadi kebocoran limbah, upaya apa yang akan dilakukan Pabrik untuk menanganinya dan biaya yang dikeluarkan diakui sebagai biaya apa?	Upaya yang dilakukan bila terjadi kebocoran limbah, langkah pertama yaitu melaporkan sebab kebocoran TKP ke polisi dan dinas lingkungan hidup kemudian melaporkan ke kantor pusat. Biaya yang dikeluarkan untuk ganti rugi ke masyarakat diakui sebagai beban dan untuk reparasi kolam IPAL diakui sebagai investasi IPAL.
4	Selain biaya limbah, jenis biaya apa saja yang diakui perusahaan sebagai biaya lingkungan?	Biaya-biaya bahan pelengkap, perpanjangan izin pembuangan limbah, biaya audit external.
5	Apakah biaya biaya lingkungan diakui sebagai beban operasi atau beban luar usaha?	Biaya lingkungan masuk kedalam kategori beban diluar beban pokok produksi.
6	Berdasarkan apakah perusahaan mengukur biaya lingkungan yang dikeluarkan?	Dalam mengukur biaya limbah, perusahaan menggunakan rupiah, sesuai yang sudah dikeluarkan dan mengacu pada hasil rata-rata realisasi anggaran

		periode sebelumnya.
7	Apakah pengukuran biaya limbah sesuai dengan kebutuhan?	Ya, pengukuran biaya limbah sesuai dengan kebutuhan, dengan menggunakan progress report, ketentuan pekerjaan dan waktu yang ditentukan.
8	Bagaimana pencatatan biaya biaya lingkungan?	Biaya lingkungan dicatat apabila telah melakukan suatu kegiatan terhadap pengendalian lingkungan/limbah.
9	Metode apa yang digunakan dalam pencatatan biaya lingkungan?	Metode yang digunakan adalah accrual basic.
10	Bagaimana perusahaan dalam menyajikan biaya lingkungan?	Biaya lingkungan disajikan di laporan keuangan pada laporan laba rugi pada beban di luar beban pokok produksi sub rekening biaya umum kebun.
11	Bagaimana pengungkapan biaya-biaya lingkungan?	Pengungkapan biaya-biaya lingkungan merupakan kewajiban perusahaan dan di unit pabrik tidak ada membuat atau mengungkapkan tentang biaya pengendalian lingkungan/limbah ini di catat atas laporan keuangan, hanya melaporkan evaluasi mengenai anggaran pengelolaan jika terjadi kenaikan atau melebihi anggaran, dan kebijakan pengungkapan CALK adalah kebijakan dari kantor pusat.

Gunung Para, 1 Februari 2018

Diketahui Oleh

Bagian Tata Usaha

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Pipin Nurafika
Panggilan : Pipin
Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Para, 7 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Sekarang : Jl. Alfalaah 4 No. 1c
HP/ Telp. Seluler : 0813-6009-6859

RIWAYAT PENDIDIKAN

Nomor Induk Mahasiswa : 1405170340
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Kapten Mochtar Basri BA, No.3 Medan
20238

No	Tingkat Pendidikan	Nama dan Tempat	Tahun Kelulusan
1	Sekolah Dasar	SDN 091604 Bandar Jambu	2008
2	SMP	SMPN 1 Tapian Dolok	2011
3	SMA	SMAN 1 Dolok Batu Nanggar	2014
4	S1	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	2018

